

////////////////////////////////////

**MODAL SOSIAL, PARIWISATA,
DAN KEMISKINAN**

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

MODAL SOSIAL, PARIWISATA, DAN KEMISKINAN

////////////////////////////////////

Rosiady H. Sayuti



*Pustaka Bangsa
(Anggota IKAPI)*

Judul : Modal Sosial, Pariwisata dan Kemiskinan
Penulis : Rosiady H. Sayuti
Editor :
Layout : Fatia Hijriyanti
Design Sampul : Ramdoni
Cetak : Tim CV. Pustaka Bangsa
Jumlah Halaman : 112 + viii hlm.
Dimensi Buku : 15 cm x 23 cm

Penerbit:

Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)

e-mail : pustakabangsa05@gmail.com

website : <https://pustakabangsa.com/>

Alamat:

- I. Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Gerisak, Mataram-NTB
Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281999271122
- II. Jalan Udayana Mataram-NTB
(Jln. Gili Gde No.12, Komplek Pertokoan Nusantara)
Telp. (0370) 7508536 / Mobile Phone; +628111444499

Cetakan Pertama: Mei 2023

ISBN: 978-623-6592-52-6

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wassyukurillah, Buku “Modal Sosial, Pariwisata, dan Kemiskinan” ini dapat penulis selesaikan dengan baik, meski dalam waktu yang relative lama, sejak ide penulisan buku ini penulis dapatkan. Modal sosial, sebagaimana definisi yang disederhanakan adalah modal non material yang dimiliki oleh setiap individu atau sekelompok masyarakat yang memiliki kekuatan sebagai sumberdaya yang fungsional sebagaimana halnya modal ekonomi maupun modal-modal yang lain. Dengan adanya modal sosial, dalam hal ini adalah kepercayaan, norma dan jaringan, akan dapat menambah keberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaannya sehari-hari adanya modal sosial ini dapat dilihat pengaruhnya dalam berbagai aspek pembangunan, seperti dalam pembangunan pariwisata dan penanggulangan kemiskinan.

Beberapa penelitian yang mengkaji hubungan antara modal sosial dan pengembangan pariwisata menunjukkan bahwa adanya kepercayaan maupun luasnya jaringan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok masyarakat terbukti dapat mengakselerasi pembangunan pariwisata, khususnya pembangunan desa-desa wisata di Nusa Tenggara Barat. Demikian pula halnya dalam program penanggulangan kemiskinan, seperti adanya PNPB atau Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat, baik yang lokusnya pedesaan maupun perkotaan, implementasi aktualisasi modal sosial dalam program tersebut cukup efektif. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM pada dasarnya adalah implementasi dari operasionalisasi modal sosial tersebut. Karena dengan adanya KSM, maka unsur-unsur modal sosial seperti kepercayaan, jaringan, dan norma pasti menjadi terlembagakan dan kemudian menjadi pilar pelaksanaan PNPM di masyarakat. Program PNPM itu sendiri dinyatakan sebagai program yang berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan secara nasional. Di Nusa Tenggara Barat, angka kemiskinan telah berhasil diturunkan dari angka 23,75% di tahun 2008 menjadi 13,68% di tahun 2022. Sebuah penurunan yang cukup signifikan, meski masih tetap berada di atas angka persentase penduduk miskin tingkat nasional yang pada tahun 2022 pada angka 9,57%. Itulah yang melatar belakangi mengapa kemudian penulis tertarik untuk membuat buku “Modal Sosial, Pariwisata, dan Kemiskinan” ini.

Atas telah selesainya buku ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada beberapa orang mahasiswa bimbingan skripsi penulis yang telah membantu dalam mempersiapkan materi buku ini. Sebagian dari isi buku ini terinspirasi dari penelitian mereka yang penulis bombing secara intens. Sebagian lagi berasal dari penelitian yang penulis lakukan, termasuk penelitian tentang kemiskinan di wilayah pesisir yang penulis lakukan ketika masih aktif di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pedesaan (P3P) Universitas Mataram pada masa lalu.

Semoga buku ini bermanfaat adanya dan mohon sumbang saran dan kritik yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan buku ini di masa-masa yang akan datang. Untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Pada akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita berserah diri.

Mataram, 1 Mei 2023
Penulis

ttd

Rosiady H. Sayuti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TEORI MODAL SOSIAL	5
A. Sejarah Lahirnya Modal Sosial	5
B. Tokoh-Tokoh Modal Sosial dan perspektifnya	10
C. Teori Modal Sosial diantara Modal Ekonomi dan Modal Budaya	13
D. Tipologi Modal Sosial	15
BAB III. PARIWISATA DAN MODAL SOSIAL.....	21
A. Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Pariwisata di NTB	21
B. Membangun Kesadaran Masyarakat dalam Mengembangkan Pariwisata	23
C. Pokdarwis sebagai Wujud Implementasi Modal Sosial.....	24
D. Membangun Kesadaran Masyarakat dalam Mengembangkan Pariwisata	27
E. Perkembangan Pariwisata di NTB: Desa Wisata.....	28
BAB IV. PARIWISATA DAN KESEJAHTERAAN.....	35
A. Peran Pariwisata dalam Perluasan Lapangan Kerja.....	35
B. Pariwisata dan Penanggulangan Kemiskinan.....	37

	C. Pariwisata dan Kesejahteraan yang Merata bagi Masyarakat.....	39
	D. Pariwisata dan Dampaknya terhadap Masyarakat.....	42
	E. Pariwisata dan Dampaknya terhadap Budaya.....	45
BAB V.	MODAL SOSIAL DAN KEMISKINAN.....	47
BAB VI.	TEORI MENGENAI KEMISKINAN.....	53
	A. Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerja Sosial.....	58
	B. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan.....	68
BAB VII.	PENGENTASAN KEMISKINAN DARI PERSPEKTIF ORANG MISKIN.....	73
	A. Pengakuan Informan Dari Wilayah Pesisir.....	73
	B. Nelayan dan Kemiskinan: Sebuah Refleksi.....	86
BAB VIII.	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL.....	93
BAB IX.	INTEGRASI MODAL SOSIAL, PARIWISATA, DAN KEMISKINAN.....	99
	DAFTAR PUSTAKA.....	107

1

PENDAHULUAN

Teori ilmu pengetahuan adalah sebuah proses dan sekaligus sebagai sebuah produk. Dikatakan sebuah proses karena dalam menggali suatu teori ilmu pengetahuan tentu melalui proses yang panjang. Ada proses ilmiah di dalamnya, dengan menggunakan metode atau kaidah-kaidah penelitian yang telah baku untuk menggali data yang diperlukan. Data itu sendiri menjadi bagian penting yang menjadi bahan baku lahirnya sebuah teori. Pergumulan yang panjang dengan diskursus yang berkesinambungan bertujuan untuk mencari dan menemukan data yang menjadi indikator sebuah variable. Indikator yang bentuk dan ukurannya terukur dan bahkan kemudian dapat diolah sedemikian rupa sesuai dengan metode penelitian yang dipergunakan. Indikator adalah fungsi dari sebuah variable yang menjadi data dalam penelitian. Dengan data inilah kemudian kita bisa mengukur variable yang kita pergunakan. Menurut Sugiyono, variable adalah suatu atribut dari obyek yang diteliti, yang menjadi focus yang akan dikelola dalam sebuah kegiatan penelitian (Sugiyono, 2014). Variabel ini dapat berupa sebuah symbol, dapat juga berupa sebuah kata seperti pendidikan, umur, pekerjaan, dan lain-lain. Dapat juga berupa sebuah frase, seperti latar belakang sosial, jenis

pekerjaan yang diharapkan, harapan terhadap pendidikan, dan lain-lain.

Teori juga adalah sebuah produk. Teori adalah produk dari sebuah proses penelitian yang relative panjang dan sudah mengalami proses uji yang tidak sederhana. Dikatakan produk karena teori yang sudah direlease, sudah dipublikasikan, tentu sudah menjalani serangkaian perdebatan yang melibatkan banyak pemikir dan para teoretikus di bidang masing-masing. Ketika seseorang ingin menguji validitas atau reliabilitas sebuah teori, tentu mereka akan melakukannya dengan mengadakan serangkaian penelitian yang sistematis dan menggunakan metode yang sama atau lebih canggih dari metode yang dipergunakan untuk melahirkan teori yang akan diuji. Terlebih dalam rangka mengkaji dan menguji eksistensi teori dalam ilmu-ilmu sosial humaniora.

Berbeda dengan pengujian teori dalam bidang saintek yang umumnya menggunakan laboratorium, eksistensi dan pengujian teori dalam ilmu sosial humaniora melibatkan masyarakat atau sekelompok masyarakat atau individu-individu yang konsisten dengan proses penelitian yang terjadi yang melahirkan teori yang akan diuji tersebut. Itulah sebabnya, proses pengujian sebuah teori dalam ilmu sosial menjadi tidak mudah dan memakan waktu yang lama, seperti halnya ketika produk teori yang dihasilkan itu diproses. Proses yang tentu dilakukan melalui serangkaian metodologi yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan metodologi yang dipergunakan, akan dihasilkan data yang juga konsisten dengan data dari teori yang akan diuji.

Data dalam ilmu-ilmu sosial adalah merupakan serangkaian fakta, informasi, atau fenomena yang

diperoleh dari proses penelitian. Proses pencarian data dalam ilmu sosial dapat melalui pendekatan kuantitatif, dapat juga melalui pendekatan kualitatif. Data kuantitatif dapat berupa angka-angka atau pun data kualitatif yang dikuantifikasi sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisisnya melalui perangkat alat analisis yang tersedia. Pada umumnya, perangkat alat analisis yang tersedia mensyaratkan angka atau symbol-simbol numerik yang kemudian menjadi bahan masukannya (inputnya). Sementara data kualitatif, biasanya berupa deskripsi atau narasi tentang karakteristik, perilaku, hasil pengamatan atau pengalaman seseorang atau sekelompok orang yang menjadi lokus penelitian. Data kualitatif ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk data primer dan data skunder. Data primer biasanya adalah data yang dihasilkan melalui wawancara atau observasi secara langsung dengan informan kunci atau mereka yang menjadi obyek dari penelitian yang sedang dilaksanakan. Sedangkan data skunder umumnya adalah data yang diperoleh tidak secara langsung, namun melalui berbagai sumber informasi yang relevan dan diasumsikan memiliki validitas yang tinggi.

Dari uraian di atas, kita mendapatkan gambaran proses lahirnya sebuah teori dan kemudian selanjutnya bagaimana teori itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana Teori Modal Sosial, yang dikembangkan oleh beberapa pakar seperti Bourdieu, Coleman, Fukuyama, dan lain-lain dapat menjadi dasar atau inspirasi dalam melaksanakan berbagai aktivitas pembangunan, khususnya terkait dengan dua sector pembangunan,

yaitu pembangunan kepariwisataan dan program penanggulangan kemiskinan.

Beberapa penelitian tentang peran modal sosial dalam pembangunan kepariwisataan dipaparkan dalam buku ini. Sebagai tambahan ilustrasi, dipaparkan juga perkembangan beberapa desa wisata yang merupakan program pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, diuraikan mengenai peran modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan dengan tambahan penjelasan tentang berbagai hal yang diperlukan dalam hubungannya dengan kemiskinan.

2

TEORI MODAL SOSIAL

A. Sejarah Lahirnya Modal Sosial

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul 'The Rural School Community Centre', Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat (Hanifan, 1916).

Dalam sejarahnya, modal sosial pertama kali muncul dalam tulisan yang dibuat oleh Lyda Judson Hanifan pada awal abad ke 20. Tulisan tersebut terinspirasi oleh kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana banyak permasalahan dalam

kehidupan yang tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh setiap individu. Mereka memerlukan kehadiran orang lain, anggota masyarakat lain, bahkan mereka yang berasal dari luar komunitas mereka sendiri. Untuk dapat membangun Kerjasama dengan pihak lain dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itulah, oleh Hanifan kemudian ditemukan pentingnya suatu modal yang harus dimiliki oleh setiap orang atau setiap masyarakat. Modal yang dimaksudkan di sini bukanlah modal konvensional seperti uang dan sumberdaya yang dapat dilihat dan diukur secara fisik, namun modal yang sifatnya berasal dari dalam manusia itu sendiri, atau berasal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Itulah yang kemudian oleh Hanifan disebut dengan istilah modal sosial. Dalam tulisannya berjudul 'The Rural School Community Centre' (Hanifan, 1916) Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat.

Dalam pandangan Hanifan, yang termasuk dalam modal sosial tersebut termasuk didalamnya adalah kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Meski Hanifan membuat istilah modal sosial kurang lebih seabad yang lalu, namun istilah tersebut baru mengemuka di dunia akademik pada akhir tahun 1980an, yaitu setelah Pierre Bourdieu, Sosiolog asal Prancis mengulas tentang modal sosial dalam sebuah tulisannya yang berjudul "The Forms of Capital" (1986).

Sekalipun Hanifan telah menggunakan istilah modal sosial hampir seabad yang lalu, istilah tersebut baru mulai dikenal di dunia akademis sejak akhir tahun 1980an. Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Perancis kenamaan, dalam sebuah tulisan yang berjudul “The Forms of Capital” (1986), dia mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi (Bourdieu, 1986). Penting juga diketahui bentuk-bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap sebagai non-ekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan keuntungan material.

Dalam tulisannya tersebut, dengan rinci Bourdieu membedakan dalam implementasinya, bagaimana modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial bekerja. Bagaimana kemudian kita dapat membedakan fungsi yang satu dengan yang lainnya dan seperti apa kemudian kita mengkonversikannya.

Modal ekonomi, menurut Bourdieu, memang dengan mudah dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang, dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Tetapi dalam kondisi tertentu modal budaya juga dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat dilembagakan, seperti kualifikasi pendidikan. Demikian pula modal sosial dalam kondisi tertentu dapat dikonversikan ke dalam modal ekonomi dan bahkan dapat dilembagakan dalam bentuk gelar keserjanaan. Dicontohkan bagaimana gelar keserjanaan seseorang dengan orang lain dari fakultas yang berbeda akan memiliki nilai jual yang berbeda,

meski diraih dari Perguruan Tinggi yang sama dan dalam waktu atau periode yang sama. Nilai akreditasi suatu perguruan tinggi juga akan turut menentukan, sehingga tidak mengherankan masalah akreditasi ini menjadi isu tersendiri dan memiliki nilai jual tersendiri. Seorang tamatan perguruan tinggi yang memiliki nilai akreditasi tinggi pada umumnya akan lebih mudah mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan seorang tamatan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang rendah nilai akreditasinya.

Atas dasar berbagai fenomena yang diamat di lapangan seperti itulah kemudian Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Jenis dan sifat keanggotaan dari berbagai jenis organisasi atau komunitas dimana individu terafiliasi akan turut berpengaruh pada besar atau kecilnya modal sosial yang dimiliki atau melekat padanya. Sebagai sebuah ilustrasi, modal sosial mahasiswa di Perguruan Tinggi ternama di Amerika Serikat tentu akan lebih tinggi atau lebih besar dari mahasiswa asal Perguruan Tinggi di negara-negara sedang berkembang. Atau mereka yang menjadi sebuah organisasi yang bergengsi dan terkenal, pasti akan memiliki modal sosial yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak menjadi anggota organisasi atau klub-klub tertentu. Dengan Bahasa yang lebih sederhana, menurut Boudieu bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki seorang anggota dari suatu kelompok tergantung pada

seberapa jauh kuantitas maupun kualitas jaringan hubungan yang dapat diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi, budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam jaringan hubungannya (Bourdieu, 1986).

Dalam tulisannya Hanifan bukan hanya sekedar memperkenalkan istilah dan memberi definisi terhadap istilah tersebut tetapi juga jelas menunjukkan suatu pemikiran yang konseptual tentang strategi pengembangan modal sosial dalam masyarakat. Pendekatan terhadap masalah yang ditunjukkannya memang kelihatan lebih bersifat praktis dan sederhana sehingga mudah dipahami. Sementara pemikiran Bourdieu ini, karena sebelumnya disampaikan dalam bahasa Perancis dan lebih bersifat gagasan filosofis dan teoritis, hanya terbatas dikenal di kalangan akademisi, tidak menjangkau kalangan pembaca yang lebih luas. Oleh karena itu konsep modal sosial yang digagasnya tetap tinggal sebagai bahan wacana di dunia perguruan tinggi.

Setelah Bourdieu, teori modal sosial ini kemudian diulas lebih lanjut oleh James Coleman yang mendasarkan tulisan-tulisannya berdasarkan pada hasil riset yang dilakukan. Sebuah tulisan yang berjudul "Social Capital in the Creation of Human Capital" (1988) memperkenalkan modal sosial sebagai sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial dengan mengaitkan komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi (James S. Coleman, 1988). Dalam uraiannya, Coleman menggunakan analisis dengan meminjam teori-teori ekonomi untuk menjelaskan gagasannya dalam menganalisis proses dan

fenomena sosial. Dengan menggunakan data yang berasal dari sebuah penelitian mengenai siswa di sebuah sekolah menengah, ia menggambarkan bagaimana modal sosial (social capital) berperan dalam menciptakan modal manusia (human capital) dengan cara memperlihatkan apa yang berlangsung dalam keluarga dan masyarakat dalam proses perkembangan pendidikan anak-anak. Sebuah contoh yang jelas dalam hal ini adalah bagaimana pentingnya keterlibatan orang tua murid dan para guru dalam wadah POMG untuk bersama-sama membahas langkahlangkah terbaik guna meningkatkan kemajuan anak didik.

Setelah itu, muncul tulisan tentang modal sosial ini dari Robert Putnam (1983, 1985) dan Francis Fukuyama (1995). Melalui tulisan-tulisan mereka konsep modal sosial mulai mendapat perhatian besar dari berbagai kalangan. Baik sebagai sebuah pendekatan teoritis yang baru untuk memahami dinamika suatu masyarakat maupun sebagai alat yang efektif untuk membantu percepatan perbaikan kondisi ekonomi, terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang.

B. Tokoh-Tokoh Modal Sosial dan perspektifnya

1. Pierre Bourdieu

Baru pada dua dekade terakhir ini, konsep modal sosial menjadi pembicaraan hangat, ketika Pierre Bourdieu (1986) membuat tulisan berjudul *The Forms of Capital*. Menurut Pierre Bourdieu, definisi modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak

terinstitusionalisasikan (John Field, 2010). Bourdieu menyatakan bahwa struktur dan fungsi sosial hanya bisa dipahami lewat modal sosial, disamping juga modal ekonomi. Pada setiap transaksi ekonomi yang bersifat material selalu disertai transaksi non-ekonomi yang bersifat immaterial berbentuk modal sosial, yaitu berupa hubungan interpersonal di antara pelaku transaksi, misalnya, hubungan antara tenaga penjualan dengan konsumen. Selain itu, perbedaan modal ekonomi dan modal sosial terlihat pada konversi. Modal ekonomi mudah dikonversi dalam bentuk uang atau pemilikan. Modal sosial (seperti gelar pendidikan) bisa juga dikonversi menjadi modal ekonomi (nilai jual ekonomi).

2. James Coleman (1988)

James Coleman membuat tulisan dengan judul *Social Capital in The Creation of Human Capital*. James Coleman mendefinisikan *social capital* yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi (dalam Fukuyama, 2007). Coleman menganalisis proses sosial dengan menggunakan teori pilihan rasional yang sarat dengan prinsip ekonomi. Kesimpulannya, modal sosial berperan menciptakan modal manusia. Jadi, modal sosial bersifat produktif. Tanpa modal sosial, seseorang tidak mungkin memperoleh keuntungan material atau keberhasilan yang optimal. Namun, modal sosial hanya memberi manfaat pada situasi tertentu saja. Contoh kerjasama yang positif dengan seorang pejabat merupakan modal sosial ketika yang bersangkutan berkuasa, tapi bisa juga terjadi sebaliknya.

3. Francis Fukuyama

Francis Fukuyama (1995) dalam buku *Trust : The Social Virtues and The Creations of Prosperity* menyatakan bahwa kondisi kesejahteraan, demokrasi dan daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara sesama warga. mendefinisikan modal sosial secara sederhana sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota-anggota suatu kelompok memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Jika para anggota kelompok itu mengharapkan bahwa anggota-anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai. Jika orang-orang yang bekerja sama dalam sebuah perusahaan saling mempercayai dan bekerja menurut serangkaian norma etis bersama, maka berbisnis hanya memerlukan sedikit biaya (Fukuyama, 1995).

Tingkat kepercayaan bertalian dengan akar budaya, etika dan moral, yang diwujudkan dalam perilaku saling bantu dan kerjasama. Keberhasilan ekonomi suatu negara bangsa setara dengan perpaduan yang harmonis antara organisasi ekonomi skala besar, korporasi yang demokratis, dan nilai budaya seperti resiprositas, tanggungjawab moral dan kepercayaan.

4. Robert Putnam

Modal sosial mencapai puncak ketenarannya ketika Robert Putnam (2000) menulis bukunya yang monumental berjudul *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*. Melalui *Bowling Alone*, Putnam telah memukul syaraf yang amat penting dan amat peka

tentang kemerosotan partisipasi warga di Amerika Serikat akibat hancurnya kepercayaan terhadap penguasa publik. Robert D. Putnam, mendefinisikan modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (Putnam, 2000).

C. Teori Modal Sosial diantara Modal Ekonomi dan Modal Budaya

Ditinjau dari segi posisinya sebagai sebuah modal, modal sosial juga memiliki karakteristik yang relative sama dengan modal lainnya, seperti modal ekonomi dan budaya. Bahwa modal tersebut, apapun bentuknya akan dicirikan oleh tiga hal, yakni oleh Bourdieu (1995): pertama, modal terakumulasi melalui investasi; kedua, modal bisa diberikan kepada yang lain melalui warisan; ketiga, modal dapat memberi keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk mengoperasikan penempatannya (dalam Patrice Bonnewitz, 2002). Modal merupakan hubungan sosial, artinya suatu energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil dalam arena dimana ia memproduksi dan mereproduksi. Dalam prakteknya, kekayaan ekonomi sama halnya dengan kekayaan budaya, dapat menjadi milik individu ataupun menjadi milik suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Kekayaan atau modal ini kemudian dapat dipertukarkan atau dikonversikan dan dapat berlangsung secara terus menerus dengan keterlibatan seluruh kelompok atau anggota kelompok masyarakat.

Dalam sistem perekonomian kuno, proses pertukaran itu lazim terjadi, baik terkait dengan modal atau barang ekonomi maupun yang sifatnya sosial atau bahkan budaya. Persetujuan pertukaran akan lebih mudah terjadi dalam suatu kelompok yang berasal dari geneologi yang sama atau telah saling kenal mengenal dalam waktu yang lama. Sebaliknya, apabila hubungan mereka belum lama dan tidak terlalu saling kenal mengenal antara kelompok atau individu yang terliabt didalmnya, maka proses pertukaran tersebut akan makin sulit atau tidak mudah. Dalam konteks ini, dari sis modal sosial dapat dijelaskan bagaimana masalah kepercayaan atau trust menjadi kuncinya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang ada dianatara mereka yang akan saling mempertukarkan modalnya, maka tentu akan semakin mudah proses pertuakaran itu akan terjadi. Sebaliknya, jika terjadi adanya kecurangan atau saling mencurangi diantara para fihak yang akan saling bertukaran, maka tentu proses pertukarannya akan. Menjadi makin sulit. Karena tidak ada fihak dapat menjamin atau saling menjamin.

Namun, ada juga pertukaran kehormatan yang dapat mengabaikan segala macam persyaratan dan hanya mengandalkan itikad baik di antara pihak-pihak yang menjamin kontrak. Namun kebanyakan transaksi di antara penjual dan pembeli cenderung melebur dalam jaringan perantara dan penjamin, yang dirancang untuk mengubah hubungan ekonomi murni di antara permintaan dan penyediaan, menjadi hubungan yang didasarkan dan dijamin oleh kekerabatan (Bourdieu & Nice, 1977). Modal simbolik dalam bentuk prestise dan nama baik keluarga yang selalu dapat diubah bentuknya

menjadi modal ekonomi, merupakan bentuk akumulasi yang paling berharga dalam masyarakat yang kekerasan iklimnya dan keterbatasan sumber daya tekniknya menuntut kerja kolektif. Modal yang terakumulasi oleh kelompok, energi dari dinamika sosial (modal kekuatan fisik, misalnya untuk pertempuran), modal ekonomi (tanah dan ternak) dan modal simbolik (selalu dikaitkan sebagai tambahan dari pemilikan modal lainnya), dapat berbeda-beda bentuknya, yang meskipun tunduk pada hukum ekuivalensi dan karenanya dapat saling dipertukarkan, masing-masing menghasilkan akibat-akibat khusus (Bourdieu & Nice, 1977).

Proses yang dilakukan dalam kerangka pasar budaya, modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik memungkinkan untuk membentuk struktur yang terjadi dalam lingkup sosial. Termasuk dalam hal ini adalah adanya ijazah dari sebuah lembaga pendidikan yang sudah diperoleh, kode budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, sopan santun, cara bergaul, dan sebagainya yang berperan didalam penentuan dan reproduksi kedudukan sosial. Modal budaya dibangun oleh kondisi keluarga dan pendidikan di sekolah, pada batas-batas tertentu dapat beroperasi secara independen dari tekanan uang, dan bahkan memberikan kompensasi bagi kekurangan uang sebagai bagian dari strategi individu atau kelompok untuk meraih kekuasaan dan status (Bourdieu & Nice, 1977).

D. Tipologi Modal Sosial

Menurut para pakar yang mempopulerkan teori modal sosial, dijelaskan bahwa modal sosial itu dapat dibagi ke dalam tiga tipologi, yaitu modal sosial sebagai

perekat/pengikat (*Bonding Social Capital*), modal sosial sebagai penyampung/menjembatani (*Bridging Social Capital*) dan modal sosial sebagai koneksi atau akses (*Linking Social*). Pembagian ke dalam tipologi ini dapat dioperasionalkan untuk mengefektifkan peran modal sosial, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam pembangunan sosial lainnya. Termasuk dalam hal pembangunan sumberdaya manusia dan penanggulangan kemiskinan (Suparman, 2013).

1. Bonding Social Capital

Bakker et al. (2019) menjelaskan pemahamannya terkait dengan *Bonding Social Capital* atau modal sosial sebagai perekat atau pengikat. Dalam konteks ini Bakker menilai bahwa modal sosial tersebut dapat berkontribusi pada terciptanya kohesi sosial dan identitas sosial suatu kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengaitkannya dengan norma yang tumbuh dan berkembang serta nilai dan berbagai Tindakan yang ada di dalam suatu komunitas (Ola et al., 2020). Penulis lain berpendapat bahwa *Bonding Social Capital* ini cenderung bersifat eksklusif, karena bonding social capital ini berorientasi ke dalam (*inward looking*) bukan ke luar. Dari segi keanggotaan, *bonding social capital* ini cenderung homogen.

Selanjutnya dikatakan bahwa oleh Hasbullah dalam Hendry (2015) bahwa dalam *bonding social capital* kohesifitas masyarakat atau antar para anggota komunitas yang tergabung didalamnya memang tinggi, namun tidak demikian dengan kekauan atau kapasitas yang ada di dalamnya. Kapasitas atau kemampuan mereka dalam mengaktualisasikan modal sosial sebagai

bagian dari upaya untuk pemberdayaan masih dipertanyakan. Kekuatan yang dimiliki sifatnya terbatas dan sangat tergantung kepada mereka yang tergabung sebagai bagiandari kelompok tersebut. Namun mana kala kemudian terjadi perubahan dalam struktur sosial yang menopang kekuatan kelompok tersebut yang diikuti dengan menurunnya kohesifitas kelompok bahkan kemudian menurunnya jumlah mereka yangterlibat di dalamnya, maka pasto modal sosial mereka akanmenjadi berkurang atau bahkan kemduain menjadi menurun. Hal ini biasanya disebabkan karena terbatasnya jaringan yang mereka miliki dengan fihak diluar mereka atau menurunnya saling percaya diantara mereka. Hal tersebut kemudian berpengaruh pula pada nilai atau norma yang mereka miliki.

2. Bridging Social Capital

Tipologi kedua dari modal sosial ini adalah yang berfungsi sebagai jembatan atau penghubung antara para fihak yang menjadi bagian penting dari modal sosial. Fungsi sebagai penghubung atau jembatan ini akan berpengaruh positif bagi meliuasnya persebaran informasi yang diperlukan dalam rangka proses pemberdayaan. *Bridging Soial Capital* ini ditandai dengan hubungan sosial yang lebih terbuka (inklusif) diantara para anggotanya yang juga cenderung lebih heterogen. Kelompok ini memiliki cara pandang yang lebih terbuka keluar (*outward looking*) dimana para anggotanya tidak akan membatasi diri pada jaringan yang dimiliki secara internal semata. Mereka akan bekerja masing-masing untuk memanfaatkan jaringan yang meeka miliki ke lauar, sehingga modal soail yang dimiliki dalam konteks

jaringan keluar akan diberdayakan untuk kepentingan bersama. Ikatan yang terjadi dalam bridging social capital ini relative lebih longgar, dibandingkan dengan ikatan yang terjadi pada *bonding social capital* (Fathy, 2019).

3. Social Linking

Modal sosial dengan tipologi ini dicirikan dengan adanya jaringan atau hubungan yang terjadi antar berbagai level dalam suatu komunitas seperti kekuatan sosial, status, dan peran yang dimiliki. *Social linking* merupakan modal sosial yang menggambarkan norma kehormatan dan jaringan hubungan kepercayaan antara orang-orang yang berinteraksi secara lintas masyarakat yang terlembaga melalui adanya atau terciptanya unsur kekuasaan, sifatnya yang umumnya formal dan memiliki suatu kewenangan atau prioritas tertentu. Dalam modal social tipologi ini, setiap anggota yang tergabung didalamnya memiliki peran yang sama untuk membangun hubungan dengan lembaga-lembaga dan individu yang memiliki kekuasaan lebih dari mereka, misalnya bekerja, mengakses layanan maupun sumber-sumber. Menurut Jordan (2015), *social linking* bermanfaat secara tidak langsung bagi masyarakat untuk berkoneksi dengan pemerintah dan memberikan akses untuk sumber-sumber (Radianti et al., 2021).

Ketiga tipe modal sosial seperti yang dijelaskan di atas penting untuk dimiliki oleh masyarakat secara seimbang, tanpa menghilangkan salah satu (Claridge, 2018). Tanpa adanya *social linking*, *bonding* dan *bridging* pada masyarakat tidaklah cukup bagi pengembangan masyarakat (*community development*). Masyarakat yang

memiliki seluruh bentuk modal sosial (*bonding*, *bridging*, dan *linking*) akan lebih mampu untuk bergerak dan berkembang dalam rangka menghadapi berbagai macam persoalan atau menghadapi kesulitan, serta dapat mengurangi dampak-dampak buruk mungkin saja terjadi pada masyarakat.

3

PARIWISATA DAN MODAL SOSIAL

A. Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Pariwisata di NTB

Hidayat et al., (2022) menyatakan bahwa prospek industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok sangatlah besar dan menjanjikan. Hal ini dikarenakan Pulau Lombok memiliki kekayaan alam yang melimpah serta keragaman tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang potensial. Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, pariwisata juga dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta meningkatkan produk daerah ke ajang internasional. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengoptimalkan potensi wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Peran modal sosial dalam pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut :

- 1) Soliditas menjadi wujud nyata Modal Sosial yang dapat digunakan dalam pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Agar kegiatan pengembangan

pariwisata di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat berjalan dengan sukses, dibutuhkan kerja sama yang baik antara semua elemen masyarakat yang terlibat. Hal ini harus didasari oleh rasa percaya yang cukup tinggi terhadap sesama anggota masyarakat. Kepercayaan tersebut tercermin dalam bentuk partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengembangan pariwisata di daerah NTB. Dengan begitu, dapat tercipta kerja sama yang efektif dan kolaboratif antara seluruh pihak yang terlibat dalam memajukan pariwisata di daerah tersebut.

- 2) Dalam mengembangkan pariwisata di daerah, koordinasi antara masyarakat menjadi sangat penting dan menjadi wujud dari jaringan modal sosial. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya kesamaan daerah, kepercayaan, kedekatan, dan hal lainnya. Melalui keterlibatan elemen yang ada di masyarakat, tercipta suatu bentuk jaringan atau hubungan sosial antara masyarakat dalam kelompok tersebut. Hal ini dapat membantu dalam menciptakan kerja sama yang baik dan memudahkan jalannya kegiatan pengembangan pariwisata di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB).
- 3) Selain itu, nilai gotong royong juga merupakan bentuk dari norma modal sosial. Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial. Adanya norma sebagai aturan tak tertulis yang menggerakkan masyarakat dapat membantu dalam menjalankan kinerja organisasi seperti Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di daerah NTB.

Dengan adanya nilai gotong royong yang kuat, masyarakat dapat bekerja sama secara efektif dan menciptakan suasana yang harmonis dalam mengembangkan pariwisata di daerah tersebut.

B. Membangun Kesadaran Masyarakat dalam Mengembangkan Pariwisata

Peran masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini telah mendorong munculnya tren baru dalam pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Tosun & Timothy (2003) menekankan bahwa aspek penting dalam pariwisata berkelanjutan adalah penekanan pada pariwisata yang berbasis masyarakat. Pendekatan ini lebih memfokuskan pada partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata.

Melalui partisipasi masyarakat, pariwisata dapat memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat lokal. Dengan adanya manfaat tersebut, penerimaan, dukungan, dan toleransi masyarakat terhadap pariwisata dapat tumbuh dengan optimal. Masyarakat lokal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari destinasi pariwisata. Integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal mendapat ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. Dengan cara ini, pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal dan pengunjung.

C. Pokdarwis sebagai Wujud Implementasi Modal Sosial

Sadar Wisata mengacu pada bentuk kesadaran masyarakat yang secara aktif melibatkan dua aspek penting yaitu 1) masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung agar tercipta lingkungan dan suasana yang kondusif, dan 2) masyarakat sadar akan haknya dan perlu menjadi turis atau traveller untuk mengunjungi suatu destinasi, sebagai kebutuhan dasar untuk bersenang-senang dan terutama untuk mengenal dan mencintai tanah airnya (Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012). Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan lembaga tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku wisata yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab, serta berperan sebagai penggerak dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan pariwisata (Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012). Pokdarwis juga perlu mewujudkan pariwisata dengan prinsip Sapta Pesona dan mampu memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dalam buku pedoman pembentukan Kelompok Sadar Wisata dijelaskan bahwa tujuan pembentukan kelompok sadar wisata adalah untuk:

1. Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan

- kepariwisataan, serta berkolaborasi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait,
2. Membangun dan menumbuhkan sikap positif dan dukungan dari masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona untuk pertumbuhan dan perkembangan pariwisata di daerah serta kesejahteraan masyarakat, dan
 3. Mengenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata di setiap daerah.

Modal sosial terbentuk berdasarkan kebutuhan yang mendasari manusia sebagai makhluk sosial. Modal sosial muncul karena adanya jaringan dan kepercayaan serta adanya norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok tertentu. James S. Coleman, 1988 menafsirkan Modal Sosial dan menyimpulkan bahwa ada tiga komponen di dalamnya. Pertama, harapan yang muncul dari rasa percaya terhadap lingkungan sosial. Kedua, arus informasi yang lancar dalam struktur sosial guna mendorong perkembangan masyarakat. Terakhir, norma yang berlaku dalam kelompok sosial dan memiliki sanksi yang jelas dan efektif.

Pokdarwis merupakan salah satu pelaku sadar wisata yang memiliki visi dan misi dalam membuat masyarakat berperan aktif dalam pengembangan wisata yang ada di daerah masing-masing. Hubungan modal sosial dengan pembentukan pokdarwis merupakan hubungan yang linear atau memiliki pengaruh yang besar terhadap berkembangnya objek wisata di suatu daerah. Modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, jaringan, nilai dan norma digunakan oleh pokdarwis untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan dari dibentuknya sebuah kelompok sadar

wisata pada masing-masing daerah. Adapun bentuk-bentuk modal sosial dalam pokdarwis yaitu :

1. Solidaritas merupakan salah satu bentuk Social Capital Trust bagi Pokdarwis. Pokdarwis harus mampu bekerjasama dilandasi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara para anggotanya. Kepercayaan terhadap Pokdarwis tercermin melalui partisipasi para anggotanya saat bekerja sama melaksanakan kegiatan Pokdarwis. Kedekatan emosional yang tercipta secara tidak langsung karena adanya rasa persaudaraan antar anggota masyarakat, sehingga timbul keinginan untuk saling membantu dan bekerjasama.
2. Koordinasi di Pokdarwis sebagai wujud Jaringan Modal Sosial. Jaringan dibentuk berdasarkan asal daerah, kepercayaan bersama, kedekatan, dan faktor lainnya. Melalui Pokdarwis, terbentuk jejaring sosial atau hubungan antar anggota komunitas dalam kelompok. Kesamaan latar belakang tinggal di wilayah yang sama mendorong anggota Pokdarwis untuk membuat gerakan dan memberdayakan diri untuk mewujudkan kepentingan bersama dengan prinsip kerjasama dalam konsep ekonomi. Hubungan sosial ini akan dimaksimalkan melalui koordinasi. Selain itu, Pokdarwis juga berperan aktif dalam jejaring sosial tersebut. Melalui program-program yang dilaksanakan, Pokdarwis mampu meningkatkan citra suatu kawasan wisata dengan mengandalkan optimalisasi jaringan sosial melalui koordinasi dalam masyarakat. Koordinasi yang terus dilakukan dalam jaringan dapat membantu Pokdarwis dan anggotanya untuk mencapai kesejahteraan bersama.

3. Nilai gotong royong sebagai bentuk norma sosial. Norma adalah seperangkat aturan yang diharapkan untuk dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat dalam suatu entitas sosial (Hasbullah, 2006). Norma juga merupakan komponen modal sosial yang berdampak pada berjalannya kegiatan Pokdarwis. Adanya norma sebagai aturan tidak tertulis yang menggerakkan masyarakat membantu Pokdarwis dalam menjalankan kinerja organisasi.

D. Membangun Kesadaran Masyarakat dalam Mengembangkan Pariwisata

Peran masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan telah memunculkan tren baru yaitu pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Menurut Tosun & Timothy (2003) penekanan penting dalam pariwisata berkelanjutan adalah pada pariwisata berbasis masyarakat, yang lebih berfokus pada partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata. Partisipasi masyarakat lokal dapat memberikan manfaat langsung bagi mereka dan meningkatkan penerimaan, dukungan, dan toleransi terhadap pariwisata. Oleh karena itu, integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.

Untuk meningkatkan mutu daerah tujuan wisata, perlu dimanfaatkan potensi pariwisata dengan menerapkan konsep *Sapta Pesona*. *Sapta Pesona* merupakan kondisi yang harus diwujudkan untuk

menarik minat wisatawan berkunjung dan memberikan kepuasan kepada mereka. Sapta Pesona mencakup unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Konsep Sapta Pesona merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan dan peningkatan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata.

Pelaksanaan Sapta Pesona sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Program Sapta Pesona merupakan inti dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pariwisata dan menjadi syarat mutlak dalam pembangunan pariwisata yang lebih baik. Sapta Pesona yang mengandung tujuh unsur dapat menentukan citra baik terhadap objek wisata dan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kualitas pariwisata. Oleh karena itu, kehadiran Sapta Pesona sangat penting dan harus dijadikan sebagai kebutuhan pokok bagi wisatawan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pariwisata.

Kesadaran masyarakat perlu dibangun melalui sapta pesona ini agar masyarakat sadar betapa pentingnya perkembangan pariwisata saat ini yang dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pembangunan dan prekonomian daerah setempat.

E. Perkembangan Pariwisata di NTB: Desa Wisata

Pariwisata merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat

setempat. Kunjungan wisatawan asing yang semakin meningkat ke Indonesia menawarkan peluang besar bagi sektor pariwisata. Dalam jangka waktu yang akan datang, Indonesia memiliki kesempatan dan keunggulan untuk mengembangkan pariwisata, terutama di kawasan Asia Pasifik yang terus berkembang.

Pengembangan pariwisata ini dapat berdampak positif pada perekonomian daerah, karena meningkatnya permintaan wisatawan dapat membuka peluang usaha dan kerja bagi masyarakat lokal. Misalnya, kedatangan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan, dan berbagai jenis usaha lainnya. Hal ini akan membantu meningkatkan pendapatan mereka dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Pariwisata menjadi salah satu program utama dari pemerintah dan mendorong pemerintahan yang ada di desa untuk melihat potensi-potensi yang ada di daerahnya agar dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi pendapatan desanya. Pemerintah Desa diajak untuk jeli melihat berbagai objek-objek potensi lokal yang dapat dijadikan sebagai tujuan wisata, dengan tujuan hal tersebut akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan pendapatan perkapita untuk masyarakatnya.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah yang memiliki tujuan atau objek desa wisata yang terdiri berbagai macam jenis, seperti objek wisata bahari, objek wisata cagar alam, objek Desa Wisata, Wisata Pertanian, wisata petualangan dll. Sebagai gambaran,

berikut diuraikan perkembangan beberapa desa wisata di NTB.

1. Desa Wisata Rembitan Pujut (Desa Sade, Lombok Tengah)

Perkembangan Desa Wisata menjadi salah satu program primadona dan terus dikembangkan oleh pemerintah dan jajaran serta kontribusi yang baik dari masyarakat. Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama dengan menyesuaikan keterampilan individual berbeda. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian kami dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata diwilayah masing-masing desa.

Produk menjadi salah satu elemen yang cukup penting dalam aktivitas pariwisata. Hal tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan destinasi, perbaikan sarana prasarana pendukung, manajemen lembaga pengelola, kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung. Salah satu produk budaya sebagai daya jual dari Desa Sade sebagai objek Desa Wisata yaitu atraksi wisata. Atraksi Wisata merupakan salah satu komponen utama yang memberikan dorongan bagi wisatawan dalam melakukan aktivitas pariwisatanya. Atraksi wisata daya tarik yang memiliki nilai keindahan, keunikan,

kekayaan alam, adat budaya dan kreativitas masyarakat yang menjadi destinasi kunjungan wisatawan.

Wisata alam dan budaya menjadi andalan di Lombok Tengah, didukung dengan produk kerajinan tangan yang unggul. Pesona keindahan dari atraksi wisata alam seperti pantai, gunung, agrowisata hijau, air terjun sangat menarik. Desa-desanya wisata di Lombok Tengah memperoleh nilai atraksi yang baik dengan skor tertinggi pada Desa Sade di Desa Rembitan dan Desa Ende di Desa Sengkol dengan wisata budaya. Wisata budaya di Lombok Tengah dapat ditemukan di desa-desa yang dihuni oleh Suku Sasak yang mempertahankan tradisi lokal dan kearifan turun temurun. Wisatawan juga dapat menikmati berbagai kesenian seperti tari duel peresean, gendang beliq, mi mertak, nyongkolan, tari marong, duel lutut anak, drama, festival tenun dan pertunjukan lainnya. Produk kerajinan tangan unggulan di NTB yaitu gerabah di Desa Penujak dan tenun di Desa Sukarara.

2. Desa Wisata Sokong (Tanjung Lombok Utara)

Pariwisata menjadi aspek penting bagi suatu daerah karena dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata menjadi sangat strategis dan membutuhkan peran dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Di Kabupaten Lombok Utara, sektor pariwisata dianggap memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama daya tarik alam dan budaya yang dapat menarik wisatawan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata terlibat dalam kegiatan adat seperti mandi

safar dan maulid adat bayan dengan memberikan bantuan dana dan promosi. Kegiatan adat ini akan menjadi event tahunan yang terus dikembangkan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya tarik budaya di Kabupaten Lombok Utara lebih berbasis pada hasil karya manusia seperti situs bersejarah, upacara adat, seni pertunjukan, dan keunikan kehidupan sehari-hari masyarakat yang masih dilestarikan. Industri pariwisata mengakui bahwa daya tarik budaya dapat menjadi faktor menarik bagi wisatawan untuk memahami dan menghargai kekayaan budaya yang ada di suatu daerah.

3. Desa Wisata Desa Wisata Saneo Woja (Dompu)

Kabupaten Dompu yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan destinasi wisata yang menarik. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah, pengembangan pariwisata di Dompu terbagi menjadi wisata alam dan wisata budaya. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kunjungan wisatawan di Dompu masih terkonsentrasi di Pantai Lakey Hu'u yang menjadi spot favorit para peselancar lokal maupun mancanegara. Akibatnya, tingkat kunjungan wisatawan di Dompu masih berfluktuasi, dan kunjungan wisatawan di setiap daerah di Dompu belum merata.

4. Desa Wisata Mas-Mas

Sebagai salah satu daerah dengan perkembangan pariwisata yang cukup pesat, Nusa Tenggara Barat setidaknya telah menetapkan 99 desa wisata yang tersebar di 10 Kabupaten/ Kota. Desa Wisata Mas-Mas

merupakan salah satu contoh pengembangan desa wisata di NTB. Desa yang terletak di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ini mengusung konsep desa wisata berbasis alam dan budaya. Berada disekitar lereng Gunung Rinjani dengan bentang alam berupa persawahan dan pegunungan yang indah, serta kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat desa, mulai dari cara berpakaian, aktifitas masyarakatnya hingga makanan khas Desa Mas-Mas sebagai alasan mengusung konsep tersebut. Kehidupan masyarakat desa yang dikemas menjadi kegiatan pariwisata menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Mas-Mas.

Studi yang dilakukan oleh Nursalim (2020) bahwa, modal sosial memiliki peranan penting di dalam pengembangan Desa Wisata Mas-Mas. Modal sosial tersebut dibentuk melalui kelompok/ komunitas yang ada seperti, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Kelompok Pengelola Village Based Tourism (Kape VBT), Himpunan Kepemudaan (Karang Taruna, dll), Kelompok PKK, Kelompok Muzakarah (Kemus), dan organisasi lain yang memiliki program berkaitan dengan desa wisata. Kelompok/ komunitas tersebut memberikan manfaat bagi setiap anggota yang aktif terkait dengan informasi dan pelatihan serta pembiayaan untuk pengembangan pariwisata.

Selain itu juga kontribusi modal sosial dalam pengembangan Desa Wisata Mas-Mas berangkat dari relasi Desa Mas-Mas dengan kelompok atau komunitas yang ada. Hal ini kemudian menghasilkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan, gotong royong serta melakukan promosi. Menariknya masyarakat

menggunakan kearifan lokal seperti awiq-awiq atau aturan lokal yang masih terjaga sebagai basis kepercayaan antara wisatawan, pengelola wisata dan stakeholders. Awiq-awiq atau aturan tersebut kemudian disosialisasikan kepada setiap wisatawan yang berkunjung kemudian diterapkan selama melakukan wisata di Desa Mas-Mas. Apabila wisatawan atau pengunjung yang melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi baik berupa teguran, peringatan, hingga tidak diberikan izin untuk berkunjung kembali.

Desa Wisata Mas-Mas dapat dijadikan sebagai salah satu contoh sukses pengembangan desa wisata di Indonesia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan desa wisata mulai dari memanfaatkan kekuatan yang ada guna menangkap peluang yang dimiliki. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki masyarakat serta berinovasi dengan program wisata yang ditawarkan. pemerintah juga harus lebih mendukung pengembangan desa wisata melalui berbagai cara seperti melakukan pelatihan, penyuluhan, menambah fasilitas serta sarana dan prasarana. Mengintensifkan promosi melalui media yang tepat untuk meningkatkan minat calon wisatawan berkunjung ke desa wisata yang ditawarkan. bagi masyarakat dalam pengembangan desa wisata diperlukan usaha untuk merawat dan meningkatkan modal sosial yang sudah ada. Selain itu, masyarakat harus lebih aktif dalam melakukan promosi untuk memperkenalkan dan mempublikasi potensi serta aktivitas desa.

4

PARIWISATA DAN KESEJAHTERAAN

A. Peran Pariwisata dalam Perluasan Lapangan Kerja

Daud (2016) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Di Indonesia, industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang kini menopang pertumbuhan ekonomi. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Syechalad (2017), pertumbuhan ekonomi di Indonesia utamanya dikarenakan oleh sektor pariwisata. Sektor ini semakin berkembang dalam mendorong pendapatan atau devisa negara untuk meningkat. Hal ini ditegaskan oleh Akuino (2013), bahwa industri pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan keuntungan devisa.

Dengan semakin banyaknya pengunjung asing yang datang ke Indonesia, sektor pariwisata mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Sehingga Indonesia memiliki keuntungan dan peluang untuk lebih mengembangkan industri pariwisatanya di masa depan, termasuk meningkatnya perjalanan internasional yang diperkirakan akan terus berlanjut, terutama di kawasan

Asia Pasifik, dan penguatan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah yang menurunkan biaya kunjungan ke Indonesia menjadi murah. Perkembangan yang tidak menentu yang terjadi pada destinasi wisata termasuk di Timur Tengah, Asia Selatan, dan wilayah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah dapat menumbuhkan lingkungan untuk mendukung usaha pada sektor pariwisata dan industri yang lebih baik dengan mengambil langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi karena Indonesia memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, beragam, dan sepanjang tahun (Yoeti, 1990).

Industri perdagangan, hotel, dan restoran bergabung dalam menciptakan sektor pariwisata, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa negara. Pemerintah telah menyadari manfaat signifikan yang diberikan oleh sektor pariwisata, yang dibuktikan dengan partisipasinya dalam bentuk peraturan dan kebijakan dalam upaya untuk memperluas industri ini dalam rencana pembangunan ekonomi Indonesia, terutama RPJMN 2015-2019 (Aliah, 2016). Karena pariwisata merupakan industri padat karya, maka pembangunan pariwisata bertujuan untuk mengembangkan pariwisata sebagai andalan dan unggulan dalam arti luas yang dapat menjadi salah satu penghasil pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat perekonomian daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dalam rangka.

Pertumbuhan peluang bisnis dan pekerjaan dipengaruhi secara positif oleh pengembangan pariwisata. Permintaan dari para wisatawan telah memunculkan bisnis-bisnis dan peluang kerja pada

sektor ini. Dengan demikian, masuknya wisatawan menciptakan peluang bagi penduduk setempat untuk memulai hotel, wisma, homestay, restoran, warung, perusahaan transportasi, dan bisnis lainnya. Pilihan-pilihan bisnis ini akan memberikan kesempatan bagi penduduk setempat untuk bekerja sekaligus berpotensi meningkatkan pendapatan mereka sehingga mereka dapat menghidupi keluarga.

Lapangan kerja akan terus membesar. Contohnya pada usaha-usaha "padat karya" seperti fasilitas dan infrastruktur, termasuk penginapan, tempat makan, dan agen perjalanan karena membutuhkan tenaga kerja untuk mengoperasikan bisnis semacam ini. Semakin banyak turis yang datang, semakin banyak pula lapangan kerja yang dihasilkan. Kebutuhan akan pekerja profesional pada industri perhotelan, perusahaan perjalanan, pemandu wisata, agen wisata dan instansi pemerintah menjadi sebagian besar lapangan kerja langsung di Indonesia. Selain itu, pariwisata juga menciptakan lapangan kerja di industri yang tidak terkait secara langsung, seperti konstruksi dan transportasi.

B. Pariwisata dan Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatnya peluang usaha dan lapangan kerja dipengaruhi secara positif oleh perkembangan pariwisata. Permintaan dari para wisatawan telah memunculkan peluang bisnis dan kerja pada sektor ini. Dengan demikian, masuknya wisatawan menciptakan peluang bagi penduduk setempat untuk memulai hotel, wisma, *homestay*, restoran, warung, perusahaan transportasi, dan bisnis lainnya. Pilihan-pilihan bisnis

ini akan memberikan kesempatan bagi penduduk setempat untuk bekerja dan juga berpotensi meningkatkan pendapatan mereka sehingga mereka dapat menghidupi keluarga mereka. Namun di samping itu, kemiskinan adalah masalah abadi yang belum ada solusi efektifnya, dan meskipun industri pariwisata telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, angka kemiskinan pun tidak dipungkiri juga meningkat.

Masalah kemiskinan adalah masalah yang sudah ada sejak lama. Masalah kemiskinan selalu ada pada setiap negara di dunia, bahkan di negara maju sekalipun. Seberapa efektifkah industri pariwisata dalam mengurangi kemiskinan? Industri pariwisata yang berkembang pesat memiliki harapan yang sangat besar dan menawarkan kesempatan untuk mengurangi masalah kemiskinan yang terus meluas. Setiap daerah memiliki kemampuan untuk mengembangkan industri pariwisata, yang akan memberikan sumber pendapatan alternatif dan meningkatkan pendapatan per kapita karena industri pariwisata yang mapan di setiap daerah akan menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya. Peran industri pariwisata dalam mengurangi kemiskinan saat ini mungkin merupakan pilihan terbaik, karena jika upaya pemerintah saja untuk melakukannya belum dapat membuahkan hasil yang diharapkan.

Ismayanti (2020), mendefinisikan usaha pariwisata sebagai usaha yang melayani permintaan wisatawan dengan menawarkan produk dan layanan untuk merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan. Menurut Undang Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata, kategori berikut ini berlaku

untuk berbagai jenis perusahaan yang termasuk dalam industri pariwisata:

1. Bisnis yang berhubungan dengan pariwisata menyediakan berbagai layanan, termasuk biro perjalanan, agen perjalanan, pemandu wisata, konferensi, insentif, dan layanan eksposisi, serta layanan impresi, konsultasi, dan informasi.
2. Usaha yang berhubungan dengan pembuatan, pemeliharaan, dan pengoperasian lokasi wisata dan artefak, termasuk bangunan dan infrastruktur yang mendukungnya.
3. Penyediaan penginapan, makanan, minuman, transportasi wisata, dan fasilitas wisata air, semuanya termasuk dalam layanan industri pariwisata.

Berikut ini adalah lima dampak positif dari pariwisata yang diidentifikasi oleh Bryden dalam Soekadijo (Soekadijo, 1997):

1. Menciptakan uang untuk membantu neraca pembayaran.
2. Perluasan pembangunan ke daerah-daerah non-industri.
3. Menghasilkan kesempatan kerja.
4. Konsekuensi yang berlipat ganda, terutama untuk pertumbuhan ekonomi
5. Meningkatkan kesadaran akan isu-isu internasional.

C. Pariwisata dan Kesejahteraan yang Merata bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan daerah, salah satu sektor ekonomi rakyat yang potensial untuk dikembangkan adalah

sektor pariwisata. Hal ini dilakukan dengan merata, sehingga memerlukan pembinaan yang terkoordinasi dan terarah. Gagasan pariwisata juga mencakup upaya pemberdayaan, usaha pariwisata, objek wisata, dan daya tarik wisata, serta berbagai kegiatan dan model usaha yang terkait dengan pariwisata yang bertujuan untuk membina hubungan yang lebih baik dengan penduduk setempat dan meningkatkan kualitas hidup mereka di sekitar tempat wisata.

Pariwisata dapat digambarkan sebagai keseluruhan jaringan tanda dan gejala yang terkait dengan keberadaan orang asing di suatu lokasi, asalkan mereka tidak berada di sana untuk melakukan aktivitas yang signifikan yang akan memberi mereka keuntungan jangka panjang atau jangka pendek. Tujuan pariwisata sebagai salah satu komponen pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesempatan berusaha, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat, yaitu suatu kondisi yang aman, sentosa, dan makmur.

Pariwisata adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yang secara langsung mempengaruhi dan melibatkan penduduk lokal dan memiliki berbagai dampak terhadapnya. Dampak-dampak ini dapat dijelaskan di beberapa tempat berikut:

1. Penghasilan bagi Masyarakat. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata menghasilkan uang, terutama bagi lingkungan sekitar. Pengeluaran wisatawan menjadi sumber pendapatan dalam interaksi antara tamu dan tuan rumah. Tidak hanya usaha yang terkait langsung dengan sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, agen perjalanan,

dan pemandu wisata, yang mendapatkan keuntungan dari pengeluaran wisatawan untuk berwisata. Distribusi pengeluaran wisatawan tersebut juga mempengaruhi industri termasuk pertanian, kerajinan tangan, transportasi, dan komunikasi, serta industri terkait lainnya.

2. Menciptakan Lapangan Kerja. Banyak pekerja dapat ditampung di sektor pariwisata karena sektor ini menawarkan berbagai macam pekerjaan kreatif. Misalnya, pengunjung pantai yang bersenang-senang dapat membayar makanan dan minuman, penyewaan tikar, tukang pijat, dan layanan lainnya.
3. Membuat Struktur Ekonomi Lebih Baik. Struktur ekonomi masyarakat meningkat dengan pendapatan yang terus bertambah pada sektor pariwisata. sehingga mereka yang bekerja di sektor pariwisata dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
4. Membuka Peluang Investasi. Investor memiliki peluang untuk berinvestasi karena keragaman perusahaan yang terlibat pada sektor pariwisata. Peluang investasi terkait pariwisata memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan meningkatkan ekonomi lokal.
5. Mendukung Inisiatif Kewirausahaan (*Interpreneurships*) Ketika bepergian ke suatu tujuan wisata, terdapat kebutuhan yang dimiliki oleh pengunjung. Motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut menjadi awal untuk memulai usaha atau berwirausaha. Peluang untuk berwirausaha menyediakan barang dan jasa akan terus berkembang pada sektor pariwisata.

D. Pariwisata dan Dampaknya terhadap Masyarakat

Pertumbuhan pariwisata berdampak langsung terhadap masyarakat dan dapat memberikan dampak baik maupun buruk. Dari segi ekonomi makro, dampak positifnya dapat dilihat dari perluasan kesempatan berusaha, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat yang lebih cepat, peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah bagi pemerintah, peningkatan pendapatan nasional, mendorong lebih banyak investasi di sektor pariwisata, dan penguatan neraca pembayaran (Yoeti, 2008). Dampak negatifnya antara lain pencemaran lingkungan, perubahan sosial, dan masalah keamanan.

Dampak pariwisata terhadap sosial budaya. Karena perubahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh industri pariwisata terjadi secara bertahap dan bukan secara instan, dampak pariwisata terhadap sosial budaya lokal tidak terlihat (abstrak). Dampak pariwisata dapat diibaratkan sebagai bola biliar; dalam hal ini, pariwisata adalah bolanya, dan lubang-lubangnya mewakili masyarakat lokal. Bola tersebut masuk ke dalam lubang-lubang secara langsung dan melalui perubahan tidak langsung. Akibatnya, masyarakat sering mengalami efek demonstrasi. Para turis dilihat oleh penduduk setempat sebagai contoh yang unggul, sehingga mereka menirunya untuk memfasilitasi kontak yang lebih mudah. Efek demonstrasi memiliki kekuatan untuk memperkuat dan memajukan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga dapat merusak dan menghancurkannya.

Suatu tindakan yang memiliki hasil yang menguntungkan bagi seseorang atau lingkungan disebut sebagai dampak positif. Muljadi (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan industri pariwisata memberikan manfaat, antara lain

1. Memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat lokal di mana pariwisata berkembang.
2. Menghasilkan devisa bagi negara yang bersangkutan
3. Sebagai pendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya, seperti pertanian, kerajinan tangan, dan lain-lain.
4. Dapat membantu membiayai pembangunan infrastruktur dengan berbagai kegunaan.
5. berfungsi sebagai stimulan dan dapat digunakan untuk membiayai pemeliharaan tengara budaya.
6. Berfungsi sebagai motivasi untuk melestarikan dan mengabadikan praktik-praktik budaya konvensional. Pertimbangkan tarian, musik, upacara, pakaian, dll.
7. Mendorong penduduk untuk memelihara dan meningkatkan kualitas rumah mereka karena industri pariwisata yang sukses bergantung pada rumah-rumah tersebut.
8. Pertukaran budaya domestik dan internasional
9. Pengembangan program pertukaran untuk pendidikan dan profesi
10. Mempekerjakan penduduk lokal dalam industri pariwisata akan membantu mereka mengembangkan kemampuan teknis dan manajerial. Beberapa dari kemampuan ini dapat diterapkan pada berbagai jenis pekerjaan.

Dampak negatif adalah tindakan yang memberikan efek buruk pada seseorang, sesuatu, atau lingkungan.

Berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari pengembangan pariwisata menurut Yulianti (2020):

1. Investasi yang relatif besar untuk setiap karyawan pada beberapa lokasi.
2. Rentan terjadi kebocoran devisa ketika bahan-bahan yang digunakan dalam pengembangan dan operasi pariwisata diimpor, atau saat fasilitas pariwisata dimiliki atau dikelola oleh pihak asing.
3. Pembangunan infrastruktur bisa sangat mahal dan dapat mengakibatkan harga yang lebih tinggi dalam ekonomi lokal.
4. Masyarakat mungkin tidak dapat menikmati situs bersejarah dan monumen budaya karena pengunjung yang merusak.
5. Kerajinan tangan, arsitektur, tarian, musik, dan teater nasional dapat kehilangan nilainya akibat komersialisasi.
6. Degradasi sistem ekologi dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan taman dan ruang publik lainnya secara berlebihan.
7. Pembatasan penggunaan pantai dan ruang rekreasi karena pembangunan infrastruktur pariwisata di sana.
8. Efek negatif dari kesenangan yang berlebihan, seperti pengenalan kebiasaan, norma budaya, dan sikap yang tidak sesuai dengan lokalitas setempat, seperti tren berpakaian yang tidak pantas.
9. Perkembangan dan perubahan yang terjadi terlalu cepat untuk dipahami, diakomodasi, dan diikuti oleh masyarakat setempat.
10. Mempekerjakan pekerja dari luar negeri atau daerah lain di negara tersebut, tidak dari pekerja lokal

E. Pariwisata dan Dampaknya terhadap Budaya

Menurut Martin dalam penelitian Sonya, dkk. (2014) mengenai dampak sosial budaya dari pariwisata, cenderung mengasumsikan bahwa akan ada perubahan sosial budaya sebagai akibat dari kedatangan wisatawan. Asumsi-asumsi tersebut adalah:

1. Perubahan terjadi melalui campur tangan eksternal, biasanya dari sistem sosial budaya yang lebih unggul ke budaya penerima yang lebih lemah.
2. Budaya-budaya asli pribumi cenderung sering dirugikan karena terjadi perubahan
3. Perubahan tersebut akan menghasilkan homogenisasi budaya, di mana identitas etnis lokal akan hilang di bawah bayang-bayang sistem industri dengan teknologi barat, birokrasi nasional dan multinasional, ekonomi yang berorientasi pada konsumen, dan gaya hidup era jet. Perubahan ini pada umumnya bersifat destruktif terhadap budaya asli.
4. Tumbuhnya inovasi dan kreativitas budaya, serta akulturasi dan regenerasi budaya.
5. Pelestarian budaya masyarakat lokal, termasuk praktik keagamaan, adat istiadat, dan tradisi, serta penerimaan masyarakat lokal terhadap penciptaan atraksi wisata baru dan masuknya pengunjung.

Sementara Subadra & Nadra (2006) menyebutkan beberapa hal berikut ini sebagai beberapa dampak negatif yang berdampak buruk pada budaya masyarakat lokal :

1. Komodifikasi, apropriasi, dan proses profanisasi (Shaw dan Williams dalam Ardika, 2003).

2. Terjadinya ketidaksepakatan atau konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan, permusuhan dan penentangan terhadap pembangunan pariwisata, dan munculnya masalah-masalah sosial seperti pelacuran, perjudian, dan pelecehan seksual (sexual abuse).
3. Masuknya wisatawan yang padat tidak dapat dihindari akan mengubah cara orang berinteraksi. seperti cara hidup yang membutuhkan komunikasi pengunjung yang timbal balik.
4. Munculnya isu-isu sosial seperti prostitusi. Kafe adalah bagian dari pembangunan fasilitas yang sangat dibutuhkan, terutama bagi para turis, terutama pengunjung internasional. Pergaulan bebas telah meningkat sebagai akibat dari semakin banyaknya usaha kafe dan kedai kopi dalam bentuk yang lebih modern.
5. Terjadi perubahan budaya. Walaupun ini secara pasti tidak mengakibatkan hilangnya keaslian budaya, Urry (1990) berpendapat bahwa budaya selalu berubah. Bahkan dalam menanggapi pariwisata, setiap pertemuan antar budaya melibatkan proses alami yang disebut akulturasi. Dia setuju bahwa efek dari pariwisata berkontribusi pada komoditisasi berbagai aspek agama, yang mengakibatkan konflik.

5

MODAL SOSIAL DAN KEMISKINAN

Konsep modal sosial, disamping juga modal ekonomi maupun modal budaya merupakan suatu hal yang sangat strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Konsep modal sosial ini sangat strategis dalam upaya pembangunan sumberdaya manusia karena menjadi insrumen untuk mengarahkan jalannya penyelenggaraan pembangunan. Modal sosial akan dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Disamping itu, tingkat kapastias masyarakat dalam mengelolal pembangunann juga dapat dipengaruhi oleh modal sosial yang dimiliki.

Dari sisi penanggulangan kemiskinan, beberapa peneliti seperti yang dikutip oleh Taufiq Al-Amin, Peran Modal Sosial dalam Program Penanggulangan Kemiskinan menyimpulkan bahwa dengan adanya kapasitas jaringan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin, disamping modal saling percaya diantara mereka, akan memiliki pengaruh terhadap kelancaran akses serta modal ekonomi yang diperlukan

dalam upaya meningkatkan penghasilan mereka (Al-Amin, 2016).

Dalam konteks inilah peran modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan dapat teruji. Dicontohkan oleh Al-Amin, (2016) bagaimana masyarakat miskin dapat meningkatkan keberdayaan dan kepercayaan diri mereka dengan membuat suatu aturan atau nilai-nilai dalam komunitasnya. Dengan demikian, aspirasi masyarakat maupun berbagai harapan yang ingin diwujudkan atau dilaksanakan oleh komunitas tersebut mulai terakomodasi. Bahkan kemudian setelah itu, jaringan akan mulai terbentuk yang nantinya akan menjadi sangat strategis dalam memperluas kesempatan masyarakat miskin untuk mengembangkan diri. Secara sistematis, proses pembentukan kelembagaan juga akan terjadi. Dari contoh ini dapat ditunjukkan secara sederhana, bagaimana modal sosial dapat dioperasionalkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Menurut Davis (1998) modal sosial dan Tindakan sosial merupakan satu kesatuan yang dapat bekerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat secara melembaga. Artinya, ketika suatu norma atau aturan-aturan yang diperlukan telah terbentuk dan terlembagakan, maka akan secara otomatis unsur-unsur modal sosial yang terdiri dari modal, kepercayaan, dan jaringan akan bekerja dalam sebuah sistem yang disebut sebagai modal sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi hanya menjadi sekumpulan individu-individu yang terkumpul dalam suatu kesatuan namun di situ ada tanggung jawab bersama, keharusan untuk saling

berbagi, serta pembagian peran dan fungsi. Seperti yang dikatakan oleh Putnam (1993) bahwa modal sosial itu menjadi perekat yang saling menguntungkan bagia sekelompok individu yang terikat dalam suatu komunitas, saling percaya dan memiliki jaringan yang luas yang dengan dasar tersebut mereka akan mampu untuk bekerja keras dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama.

Contoh lain yang diungkapkan oleh Al-Amin (2016) adalah pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang menjadi mainstream dalam penanggulangan kemiskinan secara nasional. Pembentukan KSM-KSM ini sesungguhnya adalah wujud kongkit dari operasionalisasi peningkatan kapasitas modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Khususnya terkait dengan norma dan trust atau kepercayaan. Dengan adanya KSM, masyarakat kemudian mendapat peluang untuk simpan pinjam atau pengembalian dengan mekanisme tertentu. Dari penelitian yang dilakukan, ternyata diperoleh data bahwa setelah sepuluh bulan pertama dan menginjak sepuluh bulan kedua, dari KSM-KSM yang berpartisipasi dalam proses simpan pinjam dalam program PNPM tersebut tidak ada yang macet.

Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa ikatan kepercayaan yang dibangun masih cukup efektif dan bisa menjadi modal berlangsungnya kegiatan tersebut hingga sampai putaran yang baru. Karena perguliran dana berjalan lancar dan tidak ada yang macet, maka KSM yang bersangkutan dapat mengajukan pinjaman modal lagi yang jumlahnya lebih besar dari tahun sebelumnya.

Claridge (2020) dalam tulisannya *Social capital and poverty alleviation* pada *Social Capital Research* (2020), menyatakan bahwa apabila disederhanakan modal sosial dapat dijelaskan sebagai sebuah settingan sosial yang dapat menggerakkan berbagai sumber modal. Modal tersebut dapat berupa informasi, asset fisik, sumber keuangan atau permodalan, jaringan sosial, inovasi, kreativitas dan penyelesaian masalah, solidaritas dan ketahanan masyarakat dan lain-lain yang berhubungan dengan setting sosial atau faktor sosial. Selanjutnya dari perspektif individual, modal sosial dapat dilihat dari sisi hubungan sosial atau jaringan yang dapat mempengaruhi atau memobilisasi permodalan. Sementara dari perspektif komunitas, modal sosial berhubungan dengan proses sosial yang mempengaruhi struktur sosial yang akan mempertajam kuantitas dan kualitas interaksi sosial dalam masyarakat.

Modal sosial akan bermanfaat dan dapat menjelma menjadi modal yang dibutuhkan untuk proses pemberdayaan manakala dapat menghasilkan sesuatu. Sebuah jaringan diantara warga yang sama-sama miskin tentu tidak akan banyak manfaatnya manakala tidak ada sesuatu yang dapat dibagikan, baik itu informasi, keterampilan ataupun sumberdaya yang dibutuhkan. Mereka tidak mungkin dapat saling berbagai, manakala mereka memang tidak memilikinya. Oleh karena itu, membangun jaringan sosial dengan fihak-fihak di luar komunitas mereka yang memiliki sumberdaya yang diperlukan tentu akan sangat penting dan bermanfaat. Bagi masyarakat miskin, jaringan seperti yang diperlukan.

Contoh-contoh di atas dapat menjelaskan bagaimana operasionalisasi modal sosial di masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan.

6

TEORI MENGENAI KEMISKINAN

Kemisikinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan-persoalan kemanusiaan (humanity) lainnya, seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini. Problema buta hurup, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, dan perdagangan manusia (human trafficking). Problematika sosial tersebut tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan.

Konsep mengenai kemiskinan secara teoritis memang terdapat banyak versi dan formulanya. Namun, setidaknya benang merah tentang kemiskinan telah menjadi problematika krusial di setiap Negara di dunia ini. Terdapat banyak sekali teori dan pendekatan dalam memahami kemiskinan. Setidaknya terdapat dua teori besar (*grand theory*) mengenai kemiskinan: yakni paradigma neo-liberal dan sosial demokrat yang memandang kemiskinan dari kacamata struktural dan individual. Pandangan ini kemudian menjadi basis dalam menganalisis kemesikinan maupun merumuskan kebijakan dan program-program anti kemiskinan.

Teori neo-liberal dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill (1991) secara esensi menyatakan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Sehingga teori ini mengedepankan asas-asas individualisme. Adapun menurut Adam Smith dalam bukunya *the Wealth of Nation* (1776), dan Frederick Hayek, dalam salah satu karyanya *The Road to Serfdom* (1944), telah menjadi rujukan penting teori ekonomi yang mengedepankan azas *laissez faire*, sehingga oleh Cheyne et al., (1998) disebut sebagai teori ekonomi yang mengunggulkan "mekanisme pasar bebas" dan mengusulkan "*the almost complete absence of state's intervention in the economy.*" Berdasar pada berbagai teori neo-liberal di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika yang bersangkutan. Kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya.

Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat "residual", temporer, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai "penjaga malam" yang baru boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya (Shannon, 1991; Spicker (1995); Cheyne et al. (1998)). Penerapan program-program struktural adjustment, seperti Program Jaringan Pengaman Sosial atau JPS, di beberapa negara

merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan ini.

Teori yang kedua dikemukakan oleh para pendukung sosial demokrat (teori sosial demokrat) yang memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Teori ini berpegang pada prinsip-prinsip teori ekonomi campuran (*mixed economy*) dan teori ekonomi Keynesian. Teori ini muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an. Sistem negara negara kesejahteraan yang menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial, sangat dipengaruhi oleh pendekatan "ekonomi manajemen- permintaan" (*demand-management economics*) Keynesian.

Teori sosial demokrat juga berbasic pada ajaran tokoh sosialis yaitu Karl Marx dan Frederick Engels yang mengatakan bahwa "a free market did not lead to greater social wealth, but to greater poverty and exploitation...a society is just when people's needs are met, and when inequality and exploitation in economic and social relations are eliminated" (Cheyne et al., 1998).

Kaum sosial demokrat berpendapat bahwa kesetaraan (*equality*) merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian (*independency*) dan kebebasan (*freedom*). Sehingga pencapaian freedom don hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau

sumber-sumber, seperti menjangkau guard mampu pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup, termasuk bebas dalam menentukan pilihan-pilihan (*choices*). Dengan kata lain kebebasan berarti pula memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan menghindari kematian dini, kemampuan menghindari kekurangan gizi, kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Oleh karena itu, peran negara harus mampu menjamin bahwa setiap individu mempunyai akses yang luas untuk dapat berpartisipasi dalam melakukan transaksi-transaksi sosial, ekonomi dan politik yang memungkinkan mereka menentukan pilihan sendiri dan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut teori sosial demokrat strategi penanganan masalah kemiskinan harus bersifat institusional/ kelembagaan. Seperti yang dilakukan di AS, Eropa Barat, dan Jepang, Negara-negara tersebut 75 menerpakan kebijakan sistem jaminan sosial yang berbentuk pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, karena dianggap dapat meningkatkan kebebasan dan penghasilan dasar, sehingga orang memiliki kemampuan (*capability*) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat menentukan pilihan-pilihannya (*choices*). Sebaliknya, ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (*dependency*) karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya.

Dalam konteks Indonesia, sebuah negara yang berdasar pada pancasila dan UUD 1945 dengan jumlah

populasi penduduknya tahun 2010 sekitar 235 jutaan, kemiskinan merupakan masalah yang serius dihadapi oleh bangsa kita sejak dulu hingga sekarang. Apalagi Indonesia saat ini masih dikategorikan sebagai negara berkembang (*development country*). Berbagai persoalan kemiskinan masih melanda masyarakat di berbagai daerah dan menjadi masalah nasional.

Berdasarkan definisi kemiskinan dan fakir miskin dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial (2002), jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mencapai 35,7 juta jiwa dan 15,6 juta jiwa (43%) diantaranya masuk kategori fakir miskin. Secara keseluruhan, prosentase penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total penduduk Indonesia adalah sekira 17,6 persen dan 7,7 persen. Ini berarti bahwa secara rata-rata jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, sebanyak 18 orang diantaranya adalah orang miskin, yang terdiri dari 10 orang bukan fakir miskin dan 8 orang fakir miskin (Suharto, 2004).

Adapun Data tahun 2005, menyebutkan bahwa mayoritas penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani, nelayan, buruh dan pekerja kasar masih sangat rentan terhadap kemiskinan. Saat itu, hampir 40 persen dari jumlah penduduk hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari US\$ 2 perhari (World Bank, 2005).

Devereux (2002) membagi determinan penyebab kemiskinan ke dalam tiga kelompok. Pertama, kemiskinan yang disebabkan oleh produktifitas rendah (ketidakcukupan pendapatan atas upaya kerja dan minimnya kepemilikan dan utilisasi input-input long produktif). Kedua, kemiskinan karena kerentanan (resiko

dan konsekuensi atas turunnya pendapatan dan konsumsi). Ketiga, kemiskinan karena ketergantungan (ketidakmampuan untuk menghasilkan pendapatan go akibat ketidakmampuan untuk bekerja).

A. Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerja Sosial

Kemiskinan merupakan problematika sosial, oleh karena itu bagaimana kita menelaah dan menangani masalah kemiskinan sangat dipengaruhi oleh perspektif pekerjaan sosial (*social work*). Pekerjaan sosial dimaksud, bukan hanya berupa kegiatan-kegiatan bersifat sukarela atau pekerjaan-pekerjaan amal begitu saja, melainkan merupakan profesi pertolongan kemanusiaan yang terprogram, terarah, dengan target dbaik jangka pendek dan jangka panjang yang memiliki dasar-dasar keilmuan (*body of knowledge*), nilai-nilai (*body of value*) dan keterampilan (*body of skills*) profesional yang umumnya dilakukan oleh pemerintah, NGO, Organisasi kemasyarakatan dan elemen-elemen lainnya sebagai tanggung jawab bersama dalam mengentaskan kemiskinan di muka bumi ini.

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Dalam proses pertolongannya, pekerjaan sosial berpijak pada nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional yang mengedepankan prinsip keberfungsian sosial (*social functioning*) (Siporin, 1975; Zastrow, 1982; Morales & Sheafor, 1989; Suharto, 1997). Konsep keberfungsian sosial pada intinya menunjuk pada "kapabilitas" (*capabilities*) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya.

Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa klien adalah bahwa klien memiliki subyek pembangunan; kapabilitas dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan, bahwa klien memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya.

Berbagai upaya telah dilakukan, beragam kebijakan dan program telah disebar dan diaplikasikan, dan telah menghabiskan anggaran dana yang sangat besar jumlahnya demi menanggulangi masalah kemiskinan. Namun, mengapa kemiskinan masih menjadi problem 'akut' bangsa kita hingga saat ini? Memang usaha penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti dan stagnan, karena memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang selain dana yang besar. Tetapi yang terpenting adalah kemauan dan usaha ekstra keras oleh pemerintah dan elemen-elemen lainnya harus lebih digalakkan agar berbagai program dan kebijakan tepat sasaran demi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Ada beberapa metode dan strategi bagaimana menanggulangi kemiskinan. Menurut Moser (1998) dalam konteks keluarga miskin, strategi penanganan masalah ini pada dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota keluarga dalam mengelola atau memenej berbagai asset yang dimilikinya. Moser mengistilahkannya dengan nama "*asset portfolio management*". Berdasarkan konsepsi ini, Moser, (1998) membuat kerangka analisis yang disebut "*The Asset Vulnerability Framework*". Kerangka ini meliputi berbagai pengelolaan asset seperti:

1. Asset tenaga kerja (*labour assets*), misalnya meningkatkan keterlibatan wanita dan anak-anak dalam keluarga untuk bekerja membantu ekonomi rumah tangga.
2. Asset modal manusia (*human capital assets*), misalnya memanfaatkan status kesehatan yang dapat menentukan kapasitas orang untuk bekerja atau keterampilan dan pendidikan yang menentukan kembalian atau hasil kerja (*return*) terhadap tenaga yang dikeluarkannya.
3. Asset produktif (*productive assets*), misalnya menggunakan rumah, sawah, ternak, tanaman untuk keperluan hidupnya.
4. Asset relasi rumah tangga atau keluarga (*household relation assets*), misalnya memanfaatkan jaringan dan dukungan dari sistem keluarga besar, kelompok etnis, migrasi tenaga kerja dan mekanisme "uang kiriman" (*remittances*).
5. Asset modal sosial (*social capital assets*), misalnya memanfaatkan lembaga-lembaga sosial lokal, arisan, dan pemberi kredit informal dalam proses dan sistem perekonomian keluarga.

Konsepsi kemiskinan memang memiliki dimensi yang sangat luas dan memiliki banyak arti, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya, apakah menggunakan pendekatan ekonomi, sosial- budaya, politik maupun psikologi. Misalnya, konsep kemiskinan merujuk factor social -budaya, dan psikologi seperti malas, apatis, kurang berjiwa wiraswasta sebagai penyebab seseorang miskin, atau kemiskinan struktural yang berpandangan bahwa kemiskinan akibat struktur sosial yang tidak adil (kesenjangan struktural), system

yang korup, nepotism, kolusif (akibat KKN) sebagai penyebab kemiskinan. Sejalan dengan pendekatan ini, operasionalisasi kemiskinan biasanya dirumuskan berdasarkan indikator-indikator masukan (*input indicators*).

Pendekatan lainnya, melihat kemiskinan dari indikator keluaran (*output indicators*). Di sini, kemiskinan dilihat dari gejala gejala atau hasil (*outcome*) yang ditimbulkannya. Seseorang dikatakan miskin, misalnya, kalau memiliki pendapatan rendah, rumah tidak layak huni, atau buta huruf.

Pendekatan ini menghasilkan dua cara dalam mengukur kemiskinan. Cara pertama adalah dengan menyusun indikator tunggal, seperti pendapatan atau pengeluaran yang kemudian dibakukan menjadi "garis kemiskinan" (*poverty line*). Garis kemiskinan yang sering dijadikan rujukan internasional antara lain sebesar \$1 atau \$2 AS per hari per kapita. Bank Dunia adalah badan internasional yang seringkali menggunakan cara ini. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) biasanya mengeluarkan garis kemiskinan yang disesuaikan dengan wilayah pedesaan dan perkotaan serta kabupaten/kota di Saat ini, garis kemiskinan yang bisa dipakai secara luas adalah Rp.100.000 per kapita per bulan, tanpa memperhatikan perbedaan wilayah Indonesia.

Cara kedua adalah dengan menyusun indikator komposit. Selain pendapatan atau pengeluaran, indikator komposit biasanya terdiri dari angka melek huruf, angka harapan hidup, atau akses kepada air bersih. Badan dunia yang menggunakan cara kedua adalah UNDP (*United Nations Development Programme*).

Produk UNDP yang dikenal luas untuk mengukur kemajuan dan kemiskinan adalah HDI (*Human Development Index*) dan HPI (*Human Poverty Index*).

Dengan demikian, kalau cara pertama mengukur kemiskinan hanya dari aspek ekonomi, kedua melibatkan aspek pendidikan dan kesehatan. Meskipun cara memiliki keunggulan dan kelemahan, cara kedua dapat dipandang sebagai pendekatan yang lebih baik karena, dapat menggambarkan kemiskinan lebih tepat dan akurat (Suharto, 2003).

Secara konseptual pekerja sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan-persoalan struktural sebagaimana diformulasikan oleh kaum sosial demokrat. Dilihat dari tingkatannya, ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:

1. Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
2. Kelompok miskin (*poor*). Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta huruf,).
3. Kelompok rentan (*vulnerable group*). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok *destitute* maupun miskin. Namun

sebenarnya kelompok yang sering disebut "*near poor*" (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status "rentan" menjadi "miskin" dan bahkan "*destitute*" bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial, strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah, maka intervensi pekerja sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan "*person-in-environment* dan "*person-in-situation*".

Pada pendekatan pertama, pekerja sosial melihat penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana si miskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan (per grup), maupun masyarakat. Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan (institutional) biasanya didasari oleh pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial.
2. Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial.

Pendekatan kedua, yang melihat si miskin dalam konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip individualisation dan *self-*

determinism yang melihat si miskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan urik. Program anti kemiskinan dalam kacamata ini disesuaikan dengan kejadian-kejadian dan/atau masalah-masalah yang dihadapinya dan dikategorikan kedalam beberapa strategi: Strategi kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam.

1. Strategi kesementaraan atau residual. Misalnya, bantuan stimulan untuk usaha-usaha ekonomis produktif.
2. Strategi pemberdayaan. Misalnya, program pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
3. Strategi "penanganan bagian yang hilang". Strategi yang oleh Caroline Moser disebut sebagai "the missing piece strategy" ini meliputi program-program penanganan yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau "disentuh" akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya, pemberian kredit dan Kelompok Usaha Bersama.

Sebagai gambaran bahwa kesungguhan pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan terbukti dengan memprioritaskan dana bagi orang miskin. Pada tahun 2004 alokasi dana APBN untuk masalah kemiskinan adalah 18 trilyun dan jumlah ini meningkat. Pada tahun 2007 dana yang disiapkan dari APBN untuk pengentasan kemiskinan 58 trilyun. Tidak kurang 76,4 juta orang dapat dilindungi dengan asuransi kesehatan untuk orang miskin dan yang mendekati miskin. Sejumlah 40% orang Indonesia dibiayai untuk dapat

menikmati kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kebijakan yang dapat langsung mengurangi kemiskinan melalui program bidang pendidikan gratis 9 tahun, BOS, dan asuransi kesehatan. Pada tahun 2007 dana yang disiapkan dari APBN untuk pengentasan kemiskinan 58 triliun. Tidak kurang 76,4 juta orang dapat dilindungi dengan asuransi kesehatan untuk orang miskin dan yang mendekati miskin. Sejumlah 40% orang Indonesia dibiayai untuk dapat menikmati kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kebijakan yang dapat langsung mengurangi kemiskinan melalui program bidang pendidikan gratis 9 tahun, BOS, dan asuransi kesehatan. Pada tahun 2019 APBN yang dialokasikan untuk Program Perlindungan Sosial sebesar 15,5% dari Belanja Negara. Artinya, pada tahun 2019, APBN Indonesia yang 2.461,1 T, untuk alokasi anggaran pendidikan 492,5 T, anggaran kesehatan 123,1 T, dan anggaran perlindungan sosial 387,3 T. Berdasarkan data tersebut memperlihatkan bahwa 20,01 persen APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan, 5 persen dialokasikan untuk anggaran kesehatan, dan 15,74 dialokasikan untuk anggaran perlindungan sosial. Artinya, bahwa sebesar 40,8 persen dari APBN dialokasikan untuk pengeluaran layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) (Badan Pusat Statistik, 2019).

Pemerintah menggulirkan dana BBM 27% bagi masyarakat tingkat menengah sebagai modal bergulir dan yang tepat sasaran hanya 22%. Maka ada penghematan sebesar Rp. 1 triliun. Melalui program yang pro poor, ada sekitar 500 ribu keluarga miskin dapat terbantu. Program pemerintah lainnya yang

dianggap berhasil adalah P2KP dan PPK. Program ini menyedot banyak sumber daya melalui pembukaan lapangan pekerjaan untuk sekitar 12 juta orang. PNPM akan dilaksanakan sampai 2015 dengan cakupan yang lebih besar terdiri lebih dari 6000 desa. Program PPK dan P2KP ditambah program pertanian, pesisir, dan nelayan memberikan langsung anggarannya kepada pihak kecamatan. Bantuan dari pusat sebesar 250 juta pertahun diberikan kepada setiap desa bertujuan untuk pengembangan daerah. Total dana terserap ditingkat lokal (langsung pada masyarakat desa) sebesar 60 triliun (Bakrie, 2007).

Diharapkan bahwa dalam konteks penanganan kemiskinan di provinsi NTB yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, pemerintah daerah seharusnya melakukan upaya-upaya 'treatment' penanggulangan kemiskinan dengan cara-cara sebagai berikut; kemiskinan yang disebabkan oleh produktivitas yang rendah dapat diatasi dengan kebijakan intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dalam bentuk program peningkatan produktivitas (berupa training, pelatihan, studi banding yang dibimbing para ahlinya (experts), dan juga pembangunan infrastruktur yang memadai sebagai penunjang jalur distribusi dari hilir sampai ke hulu.

Adapun tentang minimnya atau rapuhnya hasil pendapatan masyarakat miskin dapat diatasi dengan upaya perbaikan sistem pendapatan atau menciptakan kesempatan kerja yang lebih layak dari semula, seperti dengan standarisasi UMP (Upah Minimum Provinsi), membangun mental-mental entrepreneur (kewirausahaan) sehingga mereka mampu menciptakan lahan industri

kreatif dengan bahan baku yang sudah ada disekitarnya agar dapat menjadi income tambahan.

Sementara, kemiskinan yang disebabkan oleh ketergantungan (*dependence*) masyarakat miskin akibat ketidakmampuan fisik, mental, dan usia lanjut, bisa ditangani dengan membangun sistem jaring pengaman social (*social safety net*) yang berupa jaminan sosial berupa bantuan material untuk kelangsungan hidup sehari-hari dan layanan kesehatan yang murah atau terjangkau.

Program penanggulangan kemiskinan sebagai program utama pemerintah baik di daerah maupun pusat selama ini sudah berjalan dengan baik, termasuk yang dilakukan oleh Pemerintah NTB. Namun, masih harus ditingkatkan untuk menekan jumlah warga miskin baik secara kuantitas maupun kualitas agar dapat hidup layak di Negara ini. di Negara ini. Program penanggulangan ini seharusnya didesign secara *continue* (terus menerus), *suistenable* (terus menerus), terprogram secara periodik. Hal ini dilakukan agar mampu menyentuh dan merubah akar dari kemiskinan selama ini dengan pendekatan socio-culture masing- masing daerah.

Strategi penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara matang, bersenergi dan terpadu dengan berbagai departemen seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Lembaga-lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Prindagkop, Dinas PU dan Petambangan serta dinas lainnya, agar kebijakannya tidak instant dan mampu merubah derajat warga miskin, baik secara psikologis, pola pikir dan tindakan agar mampu mandiri dan terbuka akses produktifitasnya.

Oleh karena itu, program-programnya harus meliputi model-model pemberdayaan yang *educative* (mendidik) kearah *skill entrepreneur* (kewirausahaan) sebagai modal *life skill* nantinya. Dalam program ini, pemerintah dan Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam penanggulangan kemiskinan sejak identifikasi masalah, proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan monitoring dan evaluasi, masyarakat akan diberikan ruang untuk ikut menentukan skala prioritas kegiatan sehingga manfaatnya akan langsung menyentuh kepada kelompok sasaran yaitu warga miskin di NTB.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan

Miskin adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat hidup yang paling rendah serta tidak mampu mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan dan ketertidaan akses

manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan. Penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor ekstern dan intern:

1. Faktor intern

- a. Sikap. Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya.
- b. Pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan

dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek.

- c. Kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.
 - d. Konsep diri. Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan *frame of reference* yang menjadi awal perilaku.
 - e. Motif. Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.
 - f. Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.
2. Faktor eksternal
- a. Kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung

atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah kelompok dimana individu tersebut menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok dimana individu tidak menjadi anggota didalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapi individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.

- b. Keluarga. Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.
- c. Kelas sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama.
- d. Kebudayaan. Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak.

7

PENGENTASAN KEMISKINAN DARI PERSPEKTIF ORANG MISKIN

A. Pengakuan Informan Dari Wilayah Pesisir

Salah satu persoalan yang sering menjadi bahan kritikan para pihak dalam program pengentasan kemiskinan adalah karena dianggap pemerintah "tidak mendengar" apa yang menjadi persoalan kelompok masyarakat miskin. Desain program yang kemudian diimplementasikan umumnya didisain dari luar masyarakat yang menjadi sasaran dan karenanya kemudian tidak mengherankan kalau kemudian akhirnya gagal mencapai sasaran yang diinginkan.

Persoalan lainnya adalah karena "potret" yang dilakukan tidak pas dengan keadaan mereka yang sebenarnya. Dengan mengandalkan satu metode tertentu saja, misalnya survei, tentu tidak akan dapat menghasilkan suatu potret kondisi masyarakat yang berada di lapangan, yang menjadi target group kita.

Oleh karena itulah dalam penelitian ini kami menerapkan wawancara mendalam dan "memotret"

secara spesifik seseorang atau sebuah rumah tangga pada setiap desa yang menjadi lokasi penelitian. Melalui potret ini diharapkan kita akan mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan dapat memahami secara lebih baik persoalan keseharian mereka.

Disamping mengenai kondisi mereka sehari-hari, kami juga menggali apa yang mereka harapkan dari persepsi mereka sendiri mengenai program pengentasan kemiskinan yang mereka angankan akan dapat mengeluarkan mereka dari jerat kemiskinan, yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Wawancara mendalam ini dilakukan di beberapa desa pantai di Pulau Lombok.

1. Labu Pandan dan Menanga Baris

Mamiq Herna (45) dan istrinya (29), tidak mengenyam pendidikan formal. Dengan 4 (empat) orang anak, mereka tinggal di pesisir Pantai Menanga Baris. Sebelum menjadi nelayan, Herna bermata pencaharian sebagai petani. Pekerjaan ini mengikuti mertuanya di Kopang Lombok Tengah. Namun, dengan mertuanya, ia pindah ke karena pribadi Menanga Baris, bersama orang tuanya (keduanya sudah meninggal). Kini hanya ia dan isterinya sebagai pelanjut generasi.

Bersama isteri dan anaknya, Mamiq Herna menempati rumah sendiri, berukuran 6 x 8 m. Memang untuk sebuah rumah sudah bisa dikatakan cukup, terlebih rumah ini berdinding batu semen, cukup layak. Kondisi dapur Mamiq Herna, menggunakan semen, ada ventilasi, berdinding bambu setengahnya dan menggunakan kayu sebagai bahan bakar kadang-kadang menggunakan minyak tanah. Untuk kebutuhan air

bersih, cukup tersedia dari sumur sendiri. Sedang untuk fasilitas WC ada, secara umum masyarakat yang tinggal dipesisir Menanga Baris memiliki WC tapi juga ada yang tidak memiliki. Sehingga buang air besar di tepi pantai. Fasilitas listrik juga ada, mereka kebanyakan menggunakan lampu listrik.

Mamiq Herna selalu menabung dengan cara menginvestasi uang yang dia peroleh di Bank. Karena ia berprinsip bahwa manusia bisa sakit sehingga tidak bisa mencari rezeki. Oleh karena itu ia harus menyediakan cadangan uang. Itu sebabnya Mamiq Herna bisa kredit motor di salah satu lembaga pembiayaan. Sehari-hari ia memancing dan menjaring tapi rupanya beberapa bulan ini ikan sepi, sehingga pendapatan menjadi kecil bahkan kurang. Untuk menutupi kekurangan itu mamiq Herna bahkan juga beberapa nelayan di sekitar Menanga Baris mengumpulkan karang seharian penuh dan hanya bisa mencapai satu karung. Jika dijual ke penendak harganya Cuma Rp. 15.000,- selain itu ia juga kadang-kadang melayani kru kapal ferry ke pantai dari kapal yang baru datang.

Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Mamiq Herna tidak pernah berhutang pada koperasi atau bank kecuali untuk keperluan besar. Ia hanya mengandalkan ketersediaan alam dan keterbatasan peralatan. Sehingga ketika tidak ada ikan mereka hanya bisa pasrah. Tapi untuk memperbanyak peralatan tangkap ia takut meminjam modal, sebagian besar nelayan lebih banyak menyandarkan diri pada laut semata.

2. Sekotong

H. Nasip (65) dan Hj. Ramlah (60) mungkin tidak semiskin sekarang, jika saja keduanya tidak "memotong" semua aset produktivitasnya untuk berangkat haji ke Mekkah. Keduanya tidak mengenyam pendidikan formal. Anak semata wayangnya sudah menikah, dan kini hidup bersama suaminya. Dengan demikian, H. Nasip dan Hj. Ramlah, hanya berdua menikmati hari tua. Mereka tinggal di pesisir Pantai Empol, sejak masih kecil. Sebelum menjadi nelayan, dia menjual garam dan air garam yang dijualnya kepada pembuat tahu di Mataram atau daerah lain.

Mereka menempati rumah sendiri, dengan ukuran 4x4m, untuk rumah induk sedangkan dapur 4 x 3 m. Untuk rumah bisa dikatakan cukup, tetapi dari segi ventilasi sangat tidak sehat karena rumahnya tidak ada jendela. Rumah berdinding anyaman bambu beralaskan papan, berbentuk panggung dan beratap ilalang.

Kondisi dapurnya, beralaskan tanah, tidak ada ventilasi, berdinding bambu dan menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Untuk kebutuhan air bersih, ia membeli air bersih yang dibeli dari penjual air bersih yang keliling kampung. Dengan harga per jerigen Rp1500,-. Untuk sehari, ia membutuhkan rata-rata 2 jerigen. Sehingga untuk selama sebulan, keluarga Nasip menghabiskan dana sekitar Rp 90.000,- untuk membeli air bersih.

Sedang untuk fasilitas WC tidak ada, secara umum masyarakat yang tinggal di pesisir pantai ini, buang air besar di tepi pantai. Fasilitas listrik tidak ada, mereka kebanyakan menggunakan lampu biasa (templek)

sebagai penerang dan walaupun ada tetangga yang memakai listrik, itupun nyambung dari tetangga lainnya.

H. Nasip dan Hj. Ramlah, salah satu nelayan pesisir yang beruntung bisa menunaikan ibadah haji. Beliau menceritakan bagaimana bisa menunaikan ibadah haji dari hasil tangkapan kepiting, udang, bandeng. Dari hasil tersebut, Ia menabung dengan cara menginvestasi uang yang dia peroleh dengan membeli sapi.

Awalnya H. Nasip melihat tidak ada pembeli yang datang ke pesisir Empol untuk membeli udang, dia berinisiatif jual ke pasar Ampenan dengan membeli dari nelayan seharga Rp.2500,-/per kg dijual ke pasar Ampenan seharga Rp. 5000,-. Biasanya dia membawa udang sebanyak 50 Kg.

Profesi ini dijalani puluhan tahun dan sekarang sudah berhenti dikarenakan adanya "tengkulak" keliling ke para nelayan yang membuat waring atau jaring, sehingga si tengkulak mendapatkan 20-50 kg udang. H. Nasip berhenti jualan udang juga dikarenakan persaingan dan produksi tangkapan udang yang semakin menurun. Sekarang dia hanya memasang waring dengan mendapatkan imbalan dari pemilik waring, penghasilan sehari Rp2000 - 10.000,- Waring dipasang setelah sholat Isya dan sampai pagi sekitar jam 08.00, waring dicek. Nelayan pesisir di Empol tidak memiliki sampan untuk mencari ikan. Mereka hanya menggunakan waring saja untuk memperoleh kepiting, rajungan dan lain-lain.

Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, H. Nasip tidak pernah berhutang pada koperasi, perorangan karena takut, orang tuanya dulu tidak pernah hutang. Ia hanya mengandalkan ketersediaan alam dan keterbatasan peralatan. Sehingga ketika tidak ada ikan

mereka hanya bisa pasrah. Tapi untuk memperbanyak peralatan tangkap ia takut meminjam modal, ia kembali pasrah. Sebagian besar para nelayan di pesisir Empol lebih banyak mengandalkan kepasrahan daripada kepercayaan (motivasi).

Dengan pendapatan yang kecil itu, ternyata tidak diimbangi dengan jumlah tanggungan. Sebagian besar penduduk yang ada di pesisir Empol mempunyai tanggungan lebih dari 1 (satu) anak bahkan ada yang memiliki 6 anak. Sedangkan pendidikan untuk anak-anak hanya sampai tingkat SD, dikarenakan faktor ekonomi dan akses untuk sekolah yang jauh dan membutuhkan biaya besar maka anak-anak jarang ada bisa melanjutkan sekolah.

Ditempat ini juga jarang ada pemuda kebanyakan merantau ke Bali, atau ke Malaysia. Seheik ada banya perempuan yang mengalami masa mengambang. Masa mengambang ini bukannya tidak terbebas dari tanggungan, sebagian besar tanggungan perempuan ini berkisar antara 1 sampai 4 orang anak. Sementara ia (ibu) sendiri tidak punya pekerjaan.

3. Kuta Lombok Tengah

Izib (45), salah satu nelayan yang berhasil berdomisili di Pesisir pantai Kuta Lombok Tengah. Dari segi pendidikan, Izib hanya SD saja, tidak sampai pada jenjang yang lebih tinggi. Mempunyai tanggungan 1 istri, anak 3 yakni 1 putri saat ini sekolah di SMA 2 Praya, 2 putra masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

Asal aslinya dari Rembitan Loteng. Di tempatnya sekarang di Kuta ia membangun rumah diatas tanah seluas 3 are. Tidak ada nelayan pada saat pertama kali

datang ke Kuta. Sewaktu tinggal di Rambitan bersama orang tuanya menjadi petani. Tinggal di Kuta sudah 30 tahun yang lalu, Izib menjadi petani kemudian pindah pencaharian sebagai nelayan karena bidang pertanian sulit mendapatkan air dan tergantung pada air hujan. Sebagai nelayan mempunyai penghasilan yang cukup besar dan didukung dengan perdagangan yang mempunyai keuntungan 150.000-500.000.

Sampai saat ini sudah mempunyai sampan sebanyak 3 unit dengan ukuran besar dan 1 sampan kecil. Semua pembelian sampan dan mesin tempel diperoleh dari kredit di Bank BRI sebesar 30.000.000 dengan angsuran sekitar Rp. 2.120.000 per bulan selama setahun.

Ketika sedang musim ikan cumi, harga cumi Rp25.000 per kilogram. Biasanya dapat 5 kwintal cumi dari 3 kapal besar dan biaya BBM yang digunakan 1 perahu sebanyak 35 liter untuk rute jauh. Aset Pak Izib berupa kapal sebanyak dua motor Honda, dan dua buah rumah.

Izib menerapkan sistem bagi hasil. Sistem pembagian hasil tangkapan sebagai berikut: kalau 1 perahu dengan jumlah 6 orang maka hasil tangkapan dibagi 13 dikurangi dengan modal dan jika sampan kecil, hasil tangkapan dibagi 2. Hasil tangkapan langsung dijual Pengeluaran Izib selama sebulan untuk makan, pembayaran kredit, biaya sekolah, listrik, biaya pemeliharaan dan biaya asuransi pendidikan untuk 2 anaknya yang masih SD. Bagaimana kalau lagi musim badai yang musimnya para nelayan pada tidak beraktivitas, Izib melakukan aktivitas menjaga toko/kios.

Izib tergolong nelayan yang maju. Sebagian dari hasil spekulasinya dengan mengambil kredit di Bank. Pertimbangannya, jika orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa. Awalnya berhutang 20 juta selesai kredit satu tahun. Kredit di Bank dirasakan berat karena tidak adanya kelonggaran untuk tidak melakukan pembayaran. Disamping berspekulasi juga kemampuan membayar dan kredit yang diperoleh dapat diperhitungkan dengan hasil melaut. Jika lagi musim sepi, bagaimana cara membayar kredit, Pak Izib mengambil uang tabungan dulu untuk mengangsur kredit. Penyebab lain yang membuat nelayan tidak mampu berubah karena ada kebiasaan boros, begitu mendapat tangkapan yang lumayan banyak, ketidakberanian mengambil resiko dan takut maju.

Perkembangan usahanya sempat membuat bingung keluarga karena keberanian berspekulasinya. Pemikiran mengambil kredit tidak dipengaruhi oleh orang lain tetapi hasil pengambilan keputusan sendiri dan adanya dukungan dari istrinya untuk melakukan terobosan-terobosan usaha. Di pesisir pantai Kuta, lebih banyak yang belum berhasil, tetapi dilihat dari sisi kehidupan dari tempat tinggal yang dapat dikatakan layak huni sudah cukup banyak.

4. Tanjung Karang

Idin (40) sebelum pindah ke Tanjung Karang asli Klengkeng Pengsong Lombok Barat. Ia tidak pernah sekolah dan sampai saat ini tidak bisa membaca dan menulis. Ia sudah tiga kali pindah pertama dari Pengsong, terus pindah ke Kelapa Tiga dan terakhir di Tanjung Karang. Sewaktu di Pengsong usahanya

membelah batu, di Kelapa Tiga mengerjakan pertanian. Pindah ke Tanjung Karang karena tanah baik untuk pertanian maupun untuk tempat tidak punya tinggal. Sekarang sudah 10 tahun lebih tinggal di pesisir pantai Tanjung Karang. Jumlah tanggungan keluarga sebanyak 7 orang anak. Alasannya tinggal di Tanjung Karang dan membuat rumah di pinggir pantai karena tidak ada larangan tinggal di pinggir pantai, sehingga ia tidak perlu membeli tanah.

Pak Idin mempunyai tiga orang anak yang masih kecil. Dua anaknya sekolah dan lainnya masih kecil. Rumah Pak Idin sudah berdinding bata dan beratap genteng hasil berhutang sebesar Rp. 5.000.000,- dari saudaranya. Sedangkan penduduk lainnya masih berdinding bambu. Pak Idin mulai menjalani sebagai nelayan, setelah sebulan dia belajar sama temannya bagaimana cara mencari ikan dan menjalankan sampan. Pak Idin mulai melaut jam 16.00 dan balik lagi jam 7.00 pagi dan sampai saat ini belum memiliki sampan sendiri. Dan asset yang dimiliki antara lain pancing, sepeda angin, dan rumah seluas 4 x 4 m.

Hasil tangkapannya dijual langsung ke pasar, penghasilan pun tidak menentu karena sangat tergantung pada ikan. Dari hasil penjualan hasil tangkapan juga digunakan untuk membayar sampan. Biaya yang dikeluarkan untuk menangkap ikan sebesar 25.000. Jika tidak mendapat hasil berarti rugi, dibayar secara berkala dan jika 3 hari tidak mendapat tangkapan, kegiatan melaut berhenti dulu diganti dengan kegiatan cari barang-barang bekas hasilnya 5000-6000. Alternatif usaha yang lain semisal di sector

pertanian tidak ada, kecuali anak-anaknya mencari plastic. Dan musim badai bagi nelayan tidak ada kegiatan melaut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya, berhutang pada tetangga atau pemilik sampan atau yang jual BBM. Dan dikembalikan jika hasil tangkapan banyak.

Rumah tangga Pak Idin tidak menggunakan penerangan listrik, hanya memakai lampu minyak tanah. Kondisi rumah Pak Idin relative lebih baik dibanding yang lain, beralaskan semen, beratap genteng, 1 ruang tamu, 2 kamar dan jadi satu dengan dapur. Rumah sebesar 4 x 4 m dihuni sebanyak 9 orang, bagaimana penuhnya rumah tersebut! Air bersih mengambil dari RT seberang yang digunakan untuk minum, cuci dan lainnya. Tidak memiliki WC bagi nelayan merupakan hal "biasa". Jika mereka sakit tidak ada uang untuk berobat, pinjam ke tetangga juga tidak punya uang.

5. Teluk Awang

Keberhasilan nelayan bukan terletak pada sejumlah kegiatan yang beredar disekitar laut dan rumah-rumah disekitarnya tapi pada motivasi dan manajemen plus kerjasama para isteri nelayan.

Sebut nama saya Amaq Rabiah, usia sekitar 38 tahun. Menjadi nelayan sejak menikah. Mendapat modal untuk menjadi nelayan dari kakaknya yakni H. Yunus. Mereka meminjam sebesar Rp. 5.000.000,-, dbayar dengan system bagi hasil dan berjalan selama 2 tahun. Dari modal itu ia membeli sampan. Hasilnya Amaq Rabiah juga menabung di BRI Mujur. Anakya masih 2 orang, duduk di Sekolah Dasar, dan sekarang masih melaut, pendapatan sehari bisa sampai Rp. 700.000,-

jika lagi musim ikan, diluar pendapatan mobil tambang dan istrinya juga sebagai penendak .Hasil tangkapan dijual di tempat, di Tanjung Luar dan Ampenan Aset yang dimiliki rumah panggung, TV, motor dan mobil penambang. Ketika masa sepi ikan pada bulan Agustus, aktivitas Amaq Rabiah mengawasi usahanya di budi daya lobster dan istrinya melakukan pergi pasar sampai pasar tanjung luar bahkan Ampenan.

Menurut H. Yunus kunci kesuksesan Amaq Rabiah keluar dari kemiskinan nelayan adalah isterinya. Ia seperti memiliki insting yang tajam melihat kebiasaan ikan dan kebiasaan pasar. Dengan kemampuan ini isterinya mampu mengetahui diimana ia harus menjual ikan dan dimana ia harus pergi mencari. Menurut H. Yunus ketajaman insting ini sebenarnya lumrah dikalangan nelayan tapi ia memiliki ketajaman yang berbeda. Keahliannya menjadi seorang penendak ikan sangat membantu kemajuan usaha mereka.

Modal yang diberikan dari H. Yunus, dibayar dengan system bagi hasil. H. Yunus mengembangkan bantuan modal yang lunak dan tidak memberatkan, ia tidak memakai bunga bagi peminjamnya. Inilah salah satu kunci bagi kemajuan para nelayan yakni bantuan modal yang lunak dan tidak memberatkan.

Nelayan di Teluk Awang punya percaya pada pepatah "uang sama dengan kumis". Sekarang habis besok tumbuh lagi. bisa diartikan nelayan disini tidak punya kebiasaan menabung dan memutar modal. Itu sebabnya prosentase yang tidak berhasil jauh lebih besar dibandingkan dengan nelayan yang berhasil, nelayan tidak berkembang karena tidak mau menerima saran dan mendengar saran dari orang lain. Jika nelayan tidak

mampu membayar, malah menggadai sampan ke orang lain supaya dapat membayar angsuran pada pemberi pinjaman. Mereka terbiasa dengan keadaan ini dan mereka merasa tidak tertekan.

Berangkat melaut jam 16.00 dan jam 6 pagi baru pulang. Perempuannya kebanyakan kurang produktif. Jika ia tidak keluar ia pergi ke budidaya lobsternya atau menjadi sopir untuk mobil angkutannya. Amaq Rabiah tidak diam dan berhenti menunggu ikan ramai dan sepi.

6. Teluk Nara Pemenang

H. Agus, penduduk Pandanan desa Malaka persisnya di pesisir Teluk Nara. mereka sudah lama menetap dan sekarang mempunyai 4 anak dan 1 istri. 4 orang anaknya sekolah di Tsanawiyah. Sekolah SD-MTs sudah dekat dengan kampung nelayan. H. Agus tidak menjadi nelayan tetapi dia menggembala kambing. Anaknya menjadi nelayan dan tinggal di rumah petak sebelah rumah orang tuanya. Kondisi bangunan di kampung telu Nara ini hampir sama sama dengan kampung pesisir Sekotong bedanya perkampungan disini lebih teratur perumahannya.

H. Agus tidak bisa lagi menjadi nelayan sejak peristiwa yang menyebabkan ia hampir tenggelam bersama kapalnya. Sejak itu H. Agus mengalami traumatika. ia tidak lagi menjadi nelayan dan lebih banyak memelihara kambing. Disekitar rumahnya meskipun tidak ada rumput kambing-kambing itu bisa bertahan hidup bahkan beranak pinak. Kambing-kambing ini baru bisa dijual setelah berumur setahun atau dua tahun. Sehingga penghasilan H. Agus boleh dikata sekali setahun atau bisa kurang tergantung

keinginan menjual kambingnya. Bisa dibayangkan dari mana H. Agus menghidupi keluarganya.

Akibat kenyataan ini Istrinya kemudian meminjam modal di bank, istilah yang dipakai oleh para penduduk di kampung tersebut padahal yang sebenarnya adalah koperasi simpan pinjam. Dia mengangsur kredit sebesar 1.000.000 dengan angsuran per minggu sekitar Rp. 30.000. Dia sudah melakukan transaksi hutang selama 6 tahun. Uang hasil hutang tersebut digunakan untuk jualan ketupat, rokok, kangkung dan sebagainya.

Mungkin di benak kita bertanya, penduduk di kampung pesisir koq bisa menunaikan ibadah haji. Jawabannya adalah Pak H. Agus dapat berangkat haji karena jual tanah warisan. Dan selama ini ia tinggal di tanah milik H. Syukri (saudara dari H. Agus). Anak pertama H. Agus sudah tidak lagi sekolah karena biaya kurang. Sekarang pertama itu menjadi nelayan seperti penduduk lainnya.

Berangkat cari ikan jam 1 malam dan balik jam 10 pagi. Dan jika melaut jam 16 maka pulang jam 20.00. Bahan bakar yang digunakan sebanyak 2-6 liter. Kalau angin kencang maka pemakaian bahan bakar sedikit dan sebaliknya. Jika sehari tidak mendapatkan hasil maka mereka berhutang bensin dan peralatan sekali turun. Mereka akan membayarnya jika dari hasil tangkapan secara berangsur. Sehingga mereka hidup dari hasil tangkapan dan hutang.

Ia tidak mempunyai sampan sendiri, ia menjalankan sampan milik orang lain dari Kecamatan Tanjung Lombok Barat. Sistem mereka bagi hasil. Hasil tangkapan atau hasil penjualan dibagikan dengan pemilik kapal (sampan). Jika tidak mendapat tangkapan

ikan maka dia merugi berarti ngutang bahan bakar. Bahan bakar seliter Rp. 5000,-. Penghasilan sehari-hari 25.000-50.000 kotor, kebutuhan beras 1,5 kg, minyak/bensin 3 liter, gula 5000. Penduduk disini memasak menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Nelayan tidak melaut pada saat musim barat bulan 3-4 karena cuaca kurang baik, sehingga pada bulan ini penduduk di pesisir pantai Pandanan banyak yang menganggur. tapi bagaimana cara menghidupi diri dan keluarga mereka selama 1-2 bulan tersebut? Rupanya kalau lagi musim ikan sepi mereka lebih banyak berhutang.

Meskipun demikian H. Agus masih bisa membiayai kedua anaknya sekolah hingga SMU. Menurut istri H. Agus kalau ada pembayaran biaya sekolah biasanya ia menjual kambing atau mengambil modal dagangnya. H. Agus juga nelayan yang tergolong beruntung karena bisa menunaikan ibadah Haji ke Mekkah. Tapi naik haji bukan dari hasil kerja sebagai nelayan. Ia naik haji setelah menjual tanah warisan orang tuanya. Setelah pulang ia tidak punya tempat menetap karena tanahnya sudah dijual. Akhirnya ia pindah dan tinggal bersama masyarakat yang lainnya dengan menumpang di lahan milik H. Sukri saudara H. Agus.

B. Nelayan dan Kemiskinan: Sebuah Refleksi

Pemahaman mengenai kemiskinan di beberapa masyarakat nampak beragam, sesuai dengan kapasitasnya. Simak misalnya penuturan seorang nelayan dari Menanga Baris, Mamiq Herna. Menurutnya, kemiskinan itu berarti tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk makan dan memenuhi kebutuhan lainnya.

Sehingga, kemiskinan menyebabkan seseorang atau keluarga makan apa adanya, sering berhutang dan sulit berobat (jika sakit) lantaran tidak memiliki cukup uang.

Lebih lanjut ayah dari 4 (empat) orang anak ini menyarankan, perlunya keterlibatan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya di kawasan pesisir. Ia menyebutkan, keterlibatan itu antara lain dalam bentuk pemberian modal usaha, meningkatkan keterampilan para nelayan dan memberikan bantuan peralatan melaut.

Menurut Mamiq Herna, keterlibatan pemerintah itu sangat terkait dengan faktor yang menyebabkan potret pesisir yang kental berwajah kemiskinan. Disebutnya, kemiskinan di kawasan pesisir antara lain karena nelayan tidak memiliki modal untuk membeli peralatan melaut yang "canggih", terbatasnya lapangan kerja yang memungkinkan mereka bisa berkerja di saat tidak melaut karena cuaca yang tidak mendukung, ditambah isteri-isteri nelayan tidak memiliki usaha sebagai sumber penghasilan penunjang dan kesulitan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah. Senada dengan hal itu, Nasip, seorang nelayan dari Sekotong Lombok Barat, dengan nada setengah bergurau ia menyebut ciri orang miskin adalah suka "ngebon" alias berhutang untuk makan sehari-hari. Ciri ini, imbuhnya, berdampingan dan beriringan dengan ketiadaan pendapatan dan pekerjaan sehingga sulit menyekolahkan anak.

Sedikit berbeda, menurut penuturan Nasip, pernah ada bantuan dari pemerintah kepada masyarakat nelayan, yang disalurkan melalui kepala dusun setempat. Contohnya diberi waring untuk menangkap udang, kepiting dan lainnya. Dan lainnya ada koperasi di

Dusun Empol, sebagai sarana pinjam modal. Namun ia mengaku kurang mengerti tentang perkembangannya.

Nasip memberi penekanan, agar nelayan mendapatkan fasilitas permodalan Cuma-Cuma (hibah) atau kalaupun harus meminjam dengan sistem kredit, hendaknya bunga yang diterapkan jangan memberatkan (bunga ringan). Melalui fasilitas ini, menurutnya, akan banyak orang miskin di pesisir Empol yang dapat dan berani meminjam uang untuk modal usaha.

Selama ini, Nasip tidak pernah pinjam pada koperasi atau lembaga sejenis lainnya karena takut tidak bisa mengembalikan dan dari orang tuanya tidak pernah melakukan pinjaman.

Sementara itu, seorang nelayan dari Kuta Lombok Tengah, Izib, mengatakan, kemiskinan ditandai dengan ketiadaann aset (alat-alat) produksi. Nelayan, katanya, bisa dikatakan miskin jika tidak memiliki peralatan produksi ikan. "Itu sama saja dengan bukan nelayan," tuturnya.

Disamping karena tidak memiliki alat-alat produksi juga tidak memiliki modal baik modal sosial maupun modal kapital. Sebagian besar nelayan Kuta memiliki sampan artinya sudah memiliki alat produksi tapi masih kurang. Dengan demikian yang mempengaruhi faktor kemiskinan nelayan Kuta adalah kurangnya alat produksi dan modal.

Seperti yang dikatakannya, pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan pernah memberikan bantuan berupa perahu pengakap ikan kepada nelayan. Tapi karena karena manajemen yang kurang tepat bantuan itu menjadi tidak efektif bahkan terkesan sia-sia. Bagaimana tidak, ditengah rumput yang terhampar

di pinggir pantai kuta perahu bantuan itu terdampar disana tak terurus dan rusak. Pasalnya mesin kapal dicuri maling. Sejak itu perahu ini tidak terurus dan terlantar. Konon pemerintah tidak melaibatkan masyarakat dalam mengurus dan mengatur perahu bantuan itu.

Masih menurut Izip, kemiskinan sangat banyak disebabkan oleh kemampuan pikir. Menurutnya, kemampuan memikirkan dan melihat peluang serta kemampuan untuk mengatasi resiko yang kemungkinan terjadi. Sebagian besar para nelayan di Kuta menurutnya kurang memiliki pikir. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh rendahnya pendidikan. Karena tidak digunakannya pikir dalam bekerja maka para nelayan Kuta kurang memiliki keberanian untuk berspekulasi mengembangkan usaha alternatif. Keberanian para nelayan lain untuk berspekulasi mengambil modal di bank memang bisa difahami mengingat Izip memiliki tanah dan beberapa aset yang bisa menjadi agunan di bank. Tapi diungkapkannya, para nelayan lain juga punya tanah. Tapi tidak di produktifkan.

Ciri kemiskinan juga dituturkan Idin. Tidak berbeda jauh dengan nelayan yang lain, kemiskinan pandangannya adalah tidak adanya pendapatan yang cukup untuk makan dan lainnya. Ciri-ciri orang miskin, katanya, adalah makan apa adanya, sering berhutang, sulit berobat karena tidak ada uang. Ia mengaku hanya mengetahui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena ia salah seorang penerima dana BLT. Selain BLT ia tidak mengetahui lebih banyak tentang program bantuan untuk mengentaskan kemiskina, khususnya di wilayah pesisir. Idin beranggapan, bahwa dia bisa

menjadi lebih baik dari sekarang kalau punya sampan dan mesin sendiri. Artinya untuk lepas dari kemiskinan saat ini adalah diberikan bantuan oleh pemerintah baik pemberdayaan, peralatan melaut.

Menurut pengakuan Idin, dirinya pernah mendengar adanya beberapa bantuan yang datang untuk teman-teman nelayan di Tanjung Karang, tapi karena jumlahnya terbatas, dirinya tidak turut memperoleh bantuan dimaksud. Ia menyinggung adanya bantuan yang oleh kepala lingkungan sering tidak disampaikan kepada yang berhak. Menurut penuturannya, Kepala Lingkungan kerap memberikan bantuan hanya kepada kepala keluarga yang masih terkait hubungan keluarga dengannya (oknum kepala lingkungan). "Kami pernah mendengar ada bantuan ke Tanjung Karang, khususnya lingkungan. Tapi nyatanya, dipindah oleh Kepala Lingkungan," ujarnya. Dalam pengetahuannya, yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan nelayan antara lain, latar belakang pendidikan, ketiadaan lahan, jumlah anak yang lebih dari 2 (dua) orang, dan tidak tersedianya fasilitas MCK.

Dengan bahasa berbeda, namun maksud sama, Amaq Rabi'ah berpendapat, kemiskinan terkait dengan tidak adanya mata pencaharian. Selain itu, ia menyebut ciri-ciri seseorang miskin adalah, yang bersangkutan suka meminta-minta ikan pada nelayan lain, mempunyai rumah, tapi tidak layak. Dia tidak menampik, menyangkut adanya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan seperti, simpan pinjam, alat penampung ikan hasil tangkapan, pelatihan-pelatihan. Dan program tersebut berhasil, menurutnya karena mampu meningkatkan

kesejahteraan keluarga nelayan. Dan menurutnya cara yang paling tepat yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, dibantu dengan peralatan, modal dan dibimbing karena tidak ada jalan lain selain hal tersebut.

Namun agak berbeda dengan nelayan lain, Rabi'ah berpandangan, faktor yang mempengaruhi keluar dari kemiskinan seorang nelayan, dimulai dengan kredit/pinjaman sebagai modal awal, jujur dalam pengembalian kredit, tidak melakukan kegiatan yang bersifat boros, dan mengikuti bimbingan atau pelatihan yang diberikan.

Sedangkan penyebab ketidak berhasilan nelayan disebabkan, pola hidup boros, jika hasil tangkapan besar maka diinvestasikan ke hal lain dan jika lagi tidak melaut maka dilakukan penjualan investasi. Tidak berani berhutang untuk membeli peralatan melaut, tidak ada tabungan, sehingga jika tidak melaut maka tidak ada pendapatan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berhutang atau menggadai sampannya.

Begitupun dengan pandangan H. Agus. Ia memberikan pengertian menurut mengenai kemiskinan itu, bahwa miskin itu artinya tidak punya pendapatan tetap, sehingga tidak punya apa-apa, makan sulit, menyekolahkan anaknya tidak bisa. Ciri- ciri orang miskin suka "ngebon" alias hutang untuk makan. sebagai buruh, rumah gubuk. Menurut mereka jarang ada bantuan dari pemerintah mengenai program pengentasan kemiskinan di tempatnya.

Menurutnya untuk mengentaskan kemiskinan di pesisir, perlu ada sehingga ada pendapatan tetap. Bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu

harus ada peluang usaha. Mereka mendapatkan pendidikan murah. Adanya program pemerintah pada nelayan.

8

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL

Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Angka jumlah penduduk miskin seperti yang dijelaskan di atas, disebut juga sebagai Poverty Headcount Index atau P0. Jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan ini sering juga disebut sebagai Poverty Incidence.

Secara nasional pemerintah telah melaksanakan berbagai ragam program penanggulangan kemiskinan. Program-program penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional nonpersonal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) di jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsyanawiyah

(MTs), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Meski dana BOS diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik, tapi faktanya, masih tetap saja ada siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan. Penyebabnya, para orangtua kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan seperti baju, seragam, buku tulis dan buku cetak, sepatu, biaya transportasi, dan biaya lain-lain yang tidak ditanggung oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah. Program ini bersifat bantuan bukan beasiswa, karena jika beasiswa bukan berdasarkan kemiskinan, melainkan prestasi. Dana sebesar Rp 360.000 per tahun diberikan kepada siswa tingkat SD, dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti, pembelian buku pelajaran, seragam sekolah, alat-alat olahraga dan keterampilan, pembayaran transportasi ke sekolah, serta keperluan lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. BSM adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan.

4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pada saat ini Jamkesmas melayani 76,4 juta jiwa.

5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Pendistribusian beras ini diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 Kg/KK tiap bulan dan maksimal 20 Kg/KK tiap bulan dengan harga bersih Rp 1.000/kg di titik-titik distribusi. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

6. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Program WSLIC-3/PAMSIMAS merupakan program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Tujuan program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban). Sasaran program ini adalah kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi.

9

INTEGRASI MODAL SOSIAL, PARIWISATA, DAN KEMISKINAN

Dalam tulisannya berjudul 'The Rural School Community Centre' (Hanifan, 1916) Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Piere Bourdieu, definisi modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan (John Field, 2010). Modal sosial merupakan salah satu hal terpenting di dalam kehidupan masyarakat, modal sosial terdiri dari kepercayaan, norma, adat, dan jaringan. Dimana empat unsur yang ada dalam modal sosial ini akan membantu masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan dapat menjadi salah satu solusi dari meminimalisir permasalahan kemiskinan.

Modal sosial memiliki hubungan dengan pengembangan pariwisata. Pariwisata adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan

masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Perkembangan pariwisata membutuhkan empat modal sosial untuk menjadikan suatu tempat yang labelkan sebagai objek wisata dapat berkembang dengan baik dan diterima oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat yang menjadi sasaran sebagai wisatawan atau pengunjung. Unsur-unsur modal sosial yang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata sebagai bentuk integrasi modal sosial dengan pariwisata yaitu :

1. Jaringan

Jaringan sosial merupakan salah satu dimensi sosial selain kepercayaan dan norma. Konsep jaringan dalam kapital sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok (organisasi). Dalam hal ini terdapat pengertian adanya hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh normanorma yang ada. Pada konsep jaringan ini, terdapat unsur kerja, yang melalui media hubungan sosial menjadi kerja sama. Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya, konsep jaringan dalam kapital sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif (Lawang, 2005).

2. Kepercayaan

Rasa saling percaya (*trust*) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung (Putnam, 1993b). Dalam pandangan Fukuyama (1995), *trust* adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Modal sosial itu sendiri merupakan konsep yang muncul sebagai hasil dari interaksi masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus. Interaksi, komunikasi, dan kerja sama yang ada dipengaruhi keinginan untuk mencapai tujuan bersama yang terkadang berbeda dengan tujuan diri sendiri. Hal ini akan menciptakan ikatan emosional untuk menyatukan masyarakat sehingga menghasilkan kepercayaan dari relasi yang lama (Mustofa, 2013).

3. Nilai dan norma

Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentukbentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sangsi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Aturan-aturan kolektif tersebut biasanya

tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Norma sosial dalam pariwisata sangat penting diperhatikan guna menjadi acuan dalam bertindak. Ketika pendatang dan pemilik melakukan tindakan sesuai norma sosial yang telah dibangun seperti norma untung rugi, tanggung jawab dan lain sebagainya, maka kegiatan pariwisata tersebut dapat meminimalisir resiko kerugian. Seperti halnya dalam norma untung rugi, semua tindakan yang dilakukan harus mempertimbangkan untung ruginya namun harus sesuai dengan norma sosial yang ada. Sehingga pendatang dan pemilik wisata mendapatkan keuntungan yang semestinya tanpa merugikan pihak lain.

Beberapa unsur ini digunakan untuk mengembangkan sebuah objek atau tempat wisata. Modal sosial sangat berpengaruh dalam perjalanan sektor pariwisata, sebab pertama kali ketika melaksanakan atau mengajukan ide baru kepada masyarakat harus ada rasa kepercayaan, harus ada jaringan untuk misi lanjutan dari ide yang akan direalisasikan serta harus ada nilai dan norma yang dijadikan sebagai acuan agar tempat wisata yang akan dikunjungi oleh banyak orang dan dengan budaya yang berbeda tidak akan membuat masyarakat dan budaya lokal tergerus oleh budaya yang baru.

Sedangkan integrasi modal sosial dengan kemiskinan yaitu modal sosial memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi. Pembangunan industri pada masyarakat dengan modal sosial tinggi akan cepat

berkembang karena modal sosial akan menghasilkan energi kolektif yang memungkinkan berkembangnya jiwa dan semangat kewirausahaan di tengah masyarakat yang pada gilirannya akan menumbuhkan kembang dunia usaha. Investor asing akan tertarik untuk menanamkan modal usaha pada masyarakat yang menjunjung nilai kejujuran, kepercayaan, terbuka dan memiliki tingkat empati yang tinggi. Modal sosial, berpengaruh kuat pada perkembangan sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, jasa, konstruksi, pariwisata dan lainnya (Inayah, 2012).

Modal sosial dapat menjadi tangga utama dalam pengembangan sektor pariwisata dan pengembangan sektor ekonomi yang dimana akan meminimalisir kemiskinan, sebab dengan modal sosial membantu sektor pariwisata berkembang maka sektor ekonomi akan meningkat berbanding lurus dengan berkembangnya sektor pariwisata yang membuka kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, sehingga pendapatan perkapita masyarakat yang berada di daerah objek atau pengembangan pariwisata merasakan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin Angka jumlah penduduk miskin seperti yang dijelaskan di atas, disebut juga sebagai Poverty Headcount Index atau P0. Jumlah penduduk yang memiliki tingkat

konsumsi di bawah garis kemiskinan ini sering juga disebut sebagai Poverty Incidence.

Modal sosial memiliki peran yang sangat penting pada beberapa kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas. Namun Fukuyama juga mengatakan bahwa tidak semua norma, nilai dan budaya secara bersama-sama dapat saling melengkapi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sama seperti halnya modal fisik dan modal finansial, modal sosial juga bisa menimbulkan dampak negatif. Fukuyama (1999) mengatakan bahwa modal sosial dibangun oleh kepercayaan-kepercayaan antar individu. Rasa saling percaya dibentuk dalam waktu yang tidak sebentar serta memerlukan proses-proses sosial yang berliku. Modal sosial merupakan salah satu syarat bagi tercapainya kesejahteraan rumah tangga, maupun kemakmuran masyarakat pada umumnya. Modal Sosial dapat dipandang sebagai sebuah jalinan kerja sama antar warga untuk menghasilkan tindakan kolektif untuk tujuan bersama. Tentu dalam melaksanakan tindakan, seperti halnya mempunyai nilai nilai dan akar tradisi yang kuat dalam suatu komunitas dan kemudian dapat dilembagakan menjadi sebuah kebiasaan.

Menurut (Rahmat, 2008) dalam tulisannya “Memupuk Institusi Lokal dan Modal Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat” dapat dilakukan melalui pengorganisasian institusi diarahkan dalam rangka memfasilitasi komunitas lokal. Mengembangkan kerangka fikir *re-linking* (menyambung kembali) tindakan ini diarahkan untuk menyambung kembali titik temu dimensi formal dengan dimensi nonformal yang ada di dalam masyarakat. Perbaikan infrastruktur dalam

suasana religius dan cultural. Upaya Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, pada prinsipnya mempunyai dua tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan peran lembaga lokal menjadi lembaga yang mandiri sebagai pengelola program pasca program pemerintah dihentikan.

Terbentuknya modal sosial tidak bisa dipandang hanya sebagai hasil penjumlahan sekumpulan (kekuatan) individu pembentuk sistem masyarakat, melainkan harus dipandang sebagai terbentuknya jaringan kerja sama yang dinamik dan terorganisir. Keterbelakangan masyarakat pedesaan terkait erat dengan lemahnya modal sosial. Kemiskinan merupakan bentuk paling akhir terjadinya kerusakan lingkungan dan lemahnya modal sosial di pedesaan. Terdapat hubungan erat antara kuatnya modal sosial yang dipunyai satu masyarakat dengan kemampuan mengatasi kemiskinan dan kemampuan mengelola program pemberdayaan. Dengan kuatnya modal sosial paling tidak harapan dipenuhinya tujuan pembangunan pedesaan berkelanjutan, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar atau keadilan sosial, relatif mudah diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuino, C. (2013). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata (Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran) di Kota Batu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(02), 153–167.
- Al-Amin, T. (2016). Peran Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri. *Realita - Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*.
- Aliah, D. N. (2016). Peran Sektor Pariwisata Dalam Pembangunan Perekonomian Di Indonesia: Pendekatan Social Accounting Matrix (Sam). Institut Pertanian Bogor.
- Ardika, I. W. (2003). Pariwisata Budaya Berkelanjutan Refleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global. *PS Kajian Pariwisata*, Universitas Udayana.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah (Persen). BPS - Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial. (2002). *Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002*. Jakarta: BPS.
- Bakker, Y. W., Koning, J. de, & Tatenhove, J. van. (2019). Resilience and Social Capital: The Engagement of Fisheries Communities in Marine Spatial Planning. *Marine Policy*, 99, 132–139.
- Bakrie, A. (2007). Arah dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ma, Arif Institute Dalam Islam, Good Governance, Dan Pengentasan Kemiskinan*.
- Bourdieu, P. (1986). The Form of Capital. In , *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Westport, CT: Greenwood.
- Bourdieu, P., & Nice, R. (1977). Outline of a Theory of Practice. In *Outline of a Theory of Practice*.

- Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507>
- Cheyne, Christine, O'Brien, M., & Belgrave, M. (1998). *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction*. Auckland: Oxford University Press.
- Claridge, T. (2018). Functions of Social Capital - Bonding, Bridging, Linking. *Social Capital Research*, 1–7.
- Claridge, T. (2020). *Social Capital and Poverty Alleviation*. *Social Capital Research*.
- Daud, N. (2016). The Influence of Economic Growth on the Degree of Autonomy of the Regions and the Absorption of Labor and Social Welfare: Regencies and Cities of Maluku Province. *International Journal of Economics and Finance*, 8(2), 234–242.
- Davis, G. (1998). *Social Capital - The Initiative on Defining, Monitoring and Measuring Social Capital*. World Bank.
<https://archivesholdings.worldbank.org/social-capital-initiative-on-defining-monitoring-and-measuring-social-capital-wp1-overview-and-program-description-wp2-text-of-proposals-approved-for-funding>
- Devereux, S. (2002). Can Social Safety Nets Reduce Chronic Poverty? *Development Policy Review*, 20(5), 657–675.
- Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2012). *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)*. Direktorat Jenderal Pengembangan.
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Sosioglobal Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 3(2), 35.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Fukuyama, F. (1999). *Social Capital and Civil Society*. The Institute of Public Policy George Mason University.
- Hanifan, L. J. (1916). The Rural School Community Center. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 67(1), 130–138.
<https://doi.org/10.1177/000271621606700118>

- Hasbullah, J. (2006). *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. MR-United Press.
- Hidayat, A., Bustami, S. Y., & K, L. P. (2022). Workshop Peningkatan Daya Saing Pelaku Industri Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Melalui Skema Rantai Nilai Global. *Prosiding Semnaskom*, 4(1), 215–225.
- Inayah. (2012). Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 12(1).
- Ismayanti. (2020). *Dasar-dasar Pariwisata: Sebuah Pengantar*. UNIVERSITAS SAHID JAKARTA.
- James S. Coleman. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, 95–120.
<https://www.jstor.org/stable/2780243>
- John Field. (2010). *Modal Sosial (Social Capital) (Inyiak Ridwan Muzir (ed.); Edisi Indonesia)*. Kreasi Wacana.
<https://id.scribd.com/doc/114341048/Modal-Sosial-John-Field>
- John Stuart Mill. (1991). *Critical Assessments (John Cunningham Wood (ed.); Vol. 4)*. Routledge.
https://books.google.com/books/about/John_Stuart_Mill.html?hl=id&id=QNZTA5p-5ckC
- Lawang, R. M. Z. (2005). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi (F. U. Press (ed.); Cetakan Ke)*.
- Morales, A., & Sheafor, B. W. (1989). *Social Work: A profession of Many Faces*. Massachusset: Allyn and Bacon.
- Moser, C. O. N. (1998). The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction. *World Development*, 26(1), 1–19.
- Muljadi. (2010). *Keperiwisataan dan Perjalanan*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Mustofa, M. F. (2013). *PERAN MODAL SOSIAL PADA PROSES PENGEMBANGAN USAHA (Studi Kasus: Komunitas PKL SMAN 8 Jalan Veteran Malang)*.
- Nursalim, I. (2020). *PERAN MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA MAS-MAS*

- KABUPATEN LOMBOK TENGAH. Universitas Mataram.
- Ola, T. La, Wianti, N. I., & Tadjuddah, M. (2020). Bridging dan Bonding Social Capital: Analisis Relasi Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil di Taman Nasional Wakatobi. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(1), 117.
- Patrice Bonnewitz. (2002). *Premières leçons sur La sociologie de Pierre Bourdieu* (2nd edition). Paris: PUF, 1998. https://monoskop.org/images/7/79/Bonnewitz_Patrice_Premieres_lecons_sur_la_sociologie_de_Pierre_Bourdieu_2nd_edition_2002.Pdf
- Putnam, R. D. (1993a). *Making Democracy Work*. New Jersey: Princeton University Press, 41 William Street. <https://books.google.co.id/books?id=6hpoGGrHH-oC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Putnam, R. D. (1993b). *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. 6(1), 65–78.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*. In L. Crothers & C. Lockhart (Eds.), *Culture and Politics* (pp. 223–234). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62397-6_12
- Radianti, S., Latifah, A. N., Sarasati, C. D., & Humaedi, S. (2021). Potensi dan Kekuatan Modal Sosial dalam Kelompok Madani Binaan CSR PT Pertamina EP Tanjung Field. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 298. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34879>
- Rahmat. (2008). *Memupuk Institusi Lokal dan Modal Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat* [Universitas Kuningan]. <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/29/memupuk-institusi-lokal-dan-modal-sosial-dalam-kehidupan-bermasyarakat/>
- Siporin, M. (1975). *Introduction to Social Work Practice*. New York: MacMillan.

- Soekadijo. (1997). *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai “Systemic Linkage”)*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Spicker, P. (1995). *Social Policy: Themes and Approaches*. London: Prentice-Hall.
- Subadra, I. N., & Nadra, N. M. (2006). Dampak Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Lingkungan Pengembangan Desa Wisata di Jatiluwih-Tabanan. *Jurnal Manajemen Pariwisata*, 5(1), 46–64.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>
- Suharto, E. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Suharto, E. (2003, September 10). *Paradigma Baru Studi Kemiskinan*. Media Indonesia.
- Suharto, E. (2004). *Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trends and Issues*. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Suparman, A. (2013). *Potensi dan Kekuatan Modal Sosial dalam Suatu Komunitas*. *Jurnal Sosiologi*, hal:17.
- Syechalad, M. N. (2017). *Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sabang*. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA*, 4(1).
- Tosun, C., & Timothy, D. J. (2003). *Arguments for Community Participation in the Tourism Development Process*. *The Journal of Tourism Studies*, 14(2), 1–15. <https://www.researchgate.net/publication/237203991>
- Undang Undang No. 9 Tahun 1990 tentang *Kepariwisata*, (1990).
- World Bank. (2005). *Poverty Reduction*.
- Yoeti, O. A. (1990). *Tours And Travel Management*. PT Pratnya Paramita.
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradnya Paramita.
- Yulianti, D. (2020). *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pelaku Usaha Di Sekitar Objek*

Wisata Pantai Tanjung Setia, Pekon Tanjung Setia
Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat). Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Zastrow, C. (1982). Introduction to Social Welfare
Institutions: Social Problems, Services and Current
Issues. Illinois: The Dorsey Press.